



Rencana Kerja Balitbangda Prov. Kaltim tahun 2021



[balitbangdaprov.kaltim](https://www.instagram.com/balitbangdaprov.kaltim)



[balitbangdaprov.kaltim](https://www.balitbangdaprov.kaltim)



[litbang.kaltimprov.go.id](https://www.facebook.com/litbang.kaltimprov.go.id)

KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan puji dan syukur kehadiran Allah SWT karena atas berkat Rahmat dan Karunia-Nya dokumen Rencana Kerja (Renja) Balitbangda Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2021 dapat diselesaikan. Rencana Kerja (Renja) Balitbangda Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2021 telah diselaraskan dengan perkembangan dinamika internal dan eksternal Balitbangda Provinsi Kalimantan Timur serta kebijakan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.

Rencana Kerja (Renja) Tahun 2021, merupakan telaahan bagi tahun ketiga pelaksanaan Rencana Strategis (RENSTRA) Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2019-2023, ke depan diharapkan Balitbangda Provinsi Kalimantan Timur dapat mereposisi dan merevitalisasi diri, serta menentukan berbagai kebijaksanaan dan langkah-langkah untuk meningkatkan kinerja lembaga dalam meningkatkan eksistensi dan perannya bagi kemajuan Kalimantan Timur khususnya di bidang penelitian dan pengembangan.

Terima kasih disampaikan kepada semua pihak, baik pihak aparatur Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur maupun kalangan internal Balitbangda yang terlibat dalam penyusunan Renja Balitbangda Provinsi Kalimantan Tahun 2021. Semoga Rencana Kerja (Renja) Balitbangda Provinsi Kalimantan Timur ini dapat bermanfaat bagi pelaksanaan tugas-tugas kelitbangan dalam mengemban Visi dan Misi Gubernur Kalimantan Timur Tahun 2019-2023.

Samarinda, 24 Agustus 2020


Kepala,

Abdulloh Sani, SH, M.Hum
Pembina Utama Madya
NIP. 19640101 199003 1028

DAFTAR ISI

Kata Pengantar.....	i
Daftar Isi.....	ii
Daftar Tabel	iii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Landasan Hukum	2
1.3. Maksud dan Tujuan	4
1.4. Sistematika Penulisan.....	4
BAB II HASIL EVALUASI RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU	30
2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah	30
2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah	30
2.3. Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	34
2.4. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD	41
2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat	44
BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN 2021	45
3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional dan Daerah	45
3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah	47
3.3. Program dan Kegiatan Tahun 2021	55
BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH	56
BAB V PENUTUP	66

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1.1	Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja dan Pencapaian Renstra s/d Tahun 2018 Balitbangda Prov. Kaltim	7
Tabel 2.1.2	Monitoring dan Evaluasi (Monev) Kesepakatan Bersama dan Kerjasama Balitbangda Prov. Kaltim	21
Tabel 2.2.1	Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Balitbangda Prov. Kaltim	30
Tabel 2.3.1	Identifikasi Isu-Isu Strategis (lingkungan Eksternal) Balitbangda Prov. Kaltim	35
Tabel 2.4.1	Review terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2020.....	42
Tabel 3.3.1	Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2021 dan Perkiraan Maju Tahun 2022	48
Tabel 3.3.2	Judul Program dan Kegiatan Tahun 2021	55

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Bahwa Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, pada pasal 11 (1) menyebutkan bahwa perencanaan pembangunan daerah dilakukan terhadap rencana pembangunan daerah dan rencana perangkat daerah yang terdiri dari Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RPJMD), Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD), Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah dan Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah.

Bahwa Rencana Kerja Perangkat Daerah atau Renja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun yang memuat program dan kegiatan yang diperlukan untuk mencapai sasaran pembangunan. Renja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud memuat program, kegiatan, lokasi dan kelompok sasaran yang disertai indikator kinerja dan pendanaan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah yang disusun berpedoman kepada Renstra Perangkat Daerah dan RKPD. Renja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud disusun dengan tahapan :

1. Persiapan Penyusunan;
2. Penyusunan Rancangan Awal;
3. Penyusunan Rancangan
4. Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah;
5. Perumusan Rancangan Akhir;
6. Penetapan.

Setelah perumusan rancangan akhir Rencana Kerja Balitbangda Provinsi Kalimantan Timur, tahapan selanjutnya yakni pembuatan Rencana Kerja Tahun 2021 dengan berpedoman pada : RPJMD Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2019-2023, Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Tahun 2021, Renstra

Balitbangda Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2019-2023 dan evaluasi hasil Renja Tahun 2019. Rencana Kerja Balitbangda Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2021 merupakan tahun ketiga periode pembangunan jangka menengah (RPJMD) Tahun 2019-2023 di Provinsi Kalimantan Timur yang menjadi tolok ukur keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan daerah di bawah kepemimpinan Gubernur dan Wakil Gubernur Tahun 2019-2023.

1.2. Landasan Hukum

Penyusunan Renja Balitbangda Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2021 berdasarkan pada beberapa peraturan perundangan yang berlaku, yaitu :

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2002 tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan, dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Pengelolaan Keuangan Negara;
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah;
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang No. 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2017 tentang Inovasi Daerah;

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Pedoman Penelitian dan Pengembangan di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan;
14. Instruksi Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 060/2700/Litbang, tanggal 1 September 2016 perihal Pedoman Arah Penataan Kelembagaan Litbang Di Lingkungan Pemda Sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
15. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 15 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Kaltim Tahun 2005 - 2025;
16. Peraturan Daerah Kalimantan Timur Nomor 9 Tahun 2016, tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat daerah Provinsi Kalimantan Timur;
17. Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 07 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Kalimantan Timur;
18. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 2 Tahun 2019, tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2019-2023;
19. Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 24 Tahun 2019 Tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2019-2023;

20. Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 12 Tahun 2020 Tentang Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Balitbangda Prov. Kaltim.
21. Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 42 Tahun 2020 Tentang Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2021.

1.3. Maksud dan Tujuan

1.3.1 Maksud

Rencana Kerja (Renja) Balitbangda Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2021 disusun dengan maksud menjadi pedoman dalam melaksanakan kegiatan dan menyusun RKA Tahun 2021 yang mengacu pada Renstra Balitbangda Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2019-2023 dan RKPD Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2021.

1.3.2 Tujuan

Tujuan dari penyusunan Renja Tahun 2021 tersebut adalah untuk menjamin kesesuaian antara program, kegiatan, lokasi kegiatan, kelompok sasaran, serta prakiraan maju yang disusun dalam Renja Perangkat Daerah dengan Renstra Perangkat Daerah.

1.4. Sistematika Penulisan

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah maka sistematika penyusunan Rencana Kerja (Renja) Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2021, yaitu :

BAB I : PENDAHULUAN

- 1.1 Latar Belakang.
- 1.2 Landasan Hukum.
- 1.3 Maksud dan Tujuan.

1.4 Sistematika Penulisan.

BAB II : HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

- 2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah.
- 2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
- 2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah
- 2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD
- 2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

BAB III: TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN 2021

- 3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional dan Daerah
- 3.2 Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah
- 3.3 Program dan Kegiatan

BAB IV : RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

BAB V : PENUTUP

BAB II

HASIL EVALUASI RENCANA KERJA (RENJA) TAHUN LALU

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah.

Pelaksanaan program dan kegiatan yang dituangkan dalam Renja Balitbangda Prov. Kaltim Tahun 2019 dilaksanakan melalui DPA dan DPA-P Balitbangda Prov. Kaltim Tahun 2019 terdiri dari 8 (delapan) program terdiri dari :

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
3. Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pemerintah Daerah
4. Program Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan
5. Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi
6. Program Litbang Bidang Inovasi dan Teknologi
7. Program Litbang Bidang Ekonomi dan Pembangunan
8. Program Litbang Bidang Sosial dan Pemerintahan

Secara umum program prioritas yang berkaitan dengan penelitian dan pengembangan telah dijalankan sesuai dengan evaluasi hasil pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Tahun 2019. Kemudian menindaklanjuti Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah. Evaluasi terhadap indikator kinerja program dan kegiatan tahun 2019, sebagaimana tabel 2.1.1 berikut :

RENCANA KERJA (RENJA) TAHUN 2021

Tabel 2.1.1

Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Tahun 2019 dan Pencapaian Renstra Tahun 2019 Balitbangda Prov. Kaltim
(Sesuai Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 12 Tahun 2020
Tentang Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Balitbangda Prov. Kaltim)

Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes)/Kegiatan (output)		Target Kinerja Capaian Program (renstra PD) Tahun 2019-2023	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2019)			Target Program dan Kegiatan (Renja) Tahun 2020	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s/d Tahun Berjalan (2019-2021)	
									Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2019	Realisasi Renja Tahun 2019	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2020	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra
1				2	3		4	5	6	7	8=7/6	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
4	07	01	07	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase Terlayannya administrasi perkantoran	Persen	100		80	80	100	85	85	100
			01	Kegiatan pelaksanaan administrasi perkantoran	Jumlah kegiatan pelaksanaan administrasi perkantoran	Kegiatan	75		15	15	100	15	30	40
07	01	08		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Unit kerja PD yang memiliki kinerja pelayanan tepat waktu	Unit Kerja	5		2	2	100	3	3	60
			02	Kegiatan pemeliharaan peralatan dan perlengkapan sarana dan prasarana	Jumlah kegiatan pemeliharaan peralatan dan perlengkapan sarana dan prasarana	Kegiatan	40		8	8	100	8	16	40
07	01	09		Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pemerintah Daerah	Persentase ASN yang memiliki standar kompetensi	Persen	85		80	80	100	81	81	100
			01	Kegiatan koordinasi dan konsultasi kelembagaan pemerintah daerah	Jumlah ASN yang mengikuti rapat koordinasi dan konsultasi	Orang	747		134	212	158,2	130	342	45.7
			02	Kegiatan peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	Jumlah ASN yang mengikuti kegiatan peningkatnya Kualitas Sumber Daya	Orang	60		10	1	10	11	12	20

RENCANA KERJA (RENJA) TAHUN 2021

Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes)/Kegiatan (output)		Target Kinerja Capaian Program (renstra PD) Tahun 2019-2023	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2019)			Target Program dan Kegiatan (Renja) Tahun 2020	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s/d Tahun Berjalan (2019-2021)	
1				2	3		4	5	6	7	8=7/6	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
					Aparatur									
07	01	10		Program Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah	Nilai akuntabilitas kinerja PD	BB/A	81		78	56	82	79	70	88.6
			01	Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Anggaran	Jumlah dokumen perencanaan dan anggaran	Dokumen	50		10	10	100	10	20	40
				Kegiatan Penyusunan Laporan Pengendalian dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah	Jumlah laporan evaluasi pengendalian dan evaluasi pelaksanaan kegiatan	Laporan	115		23	23	100	23	46	40
07	01	23		Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi	Persentase teknologi yang dapat dimanfaatkan dengan optimal	Persen	80		80	80	100	80	80	100
			02	Kegiatan Pengembangan Teknologi Informasi Kelitbangan	Persentase terselenggaranya program pemanfaatan teknologi informasi kelitbangan	Persen	80		80	80	80	100	80	100
					Jumlah artikel jurnal riset pembangunan dan buletin lembusua	laporan	350		70	10	100	10	20	5.7
				Kegiatan Rakorda Kelitbangan	Persentase terselenggaranya kegiatan Rakorda Kelitbangan	Persen	100		100	100	100	100	100	100

RENCANA KERJA (RENJA) TAHUN 2021

Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes)/Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (renstra PD) Tahun 2019-2023	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2019)			Target Program dan Kegiatan (Renja) Tahun 2020	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s/d Tahun Berjalan (2019-2021)	
1				2	3	4	5	6	7	8=7/6	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
07	01	48		Program Litbang Bidang Sosial dan Pemerintahan	Persentase rekomendasi yang dihasilkan litbang bidang sosial dan pemerintahan	Persen	100		70	70	100	80	80
				Litbang Bidang Sosial dan Pemerintahan	Jumlah Laporan Litbang Sub Bidang Sosial dan Budaya Yang Dilaksanakan	Laporan	5		1	1	100	1	2
					Jumlah Laporan Litbang Sub Bidang Kependudukan , Pemberdayaan Yang Dilaksanakan	Laporan	5		1	1	100	1	2
					Jumlah Laporan Litbang Sub Bidang Penyelenggaraan Pemerintah & Pengkajian Peraturan Yang Dilaksanakan	Laporan	5		1	1	100	1	2
				Kegiatan peneltian mandiri bidang social dan pemerintahan	Jumlah laporan penelitian mandiri bidang social dan pemerintahan	Laporan	35		7	7	100	7	14
07	01	41		Program Litbang Bidang Ekonomi dan Pembangunan	Persentase rekomendasi yang dihasilkan litbang bidang ekonomi dan pembangunan	Persen	100		70	70	100	80	80
			01	Litbang Bidang Ekonomi dan Pembangunan	Jumlah Laporan Litbang Sub Bidang Ekonomi yang dilaksanakan	Laporan	5		1	1	100	1	2

RENCANA KERJA (RENJA) TAHUN 2021

Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes)/Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (renstra PD) Tahun 2019-2023	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2019)			Target Program dan Kegiatan (Renja) Tahun 2020	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s/d Tahun Berjalan (2019- 2021)	
								Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2019	Realisasi Renja Tahun 2019	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2020	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra
1				2	3	4	5	6	7	8=7/6	9	10=(5+7+ 9)	11=(10/4)
					Jumlah Laporan Litbang Sub Bidang Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup yang dilaksanakan	Laporan	5	1	1	100	1	2	40
					Jumlah laporan Litbang Sub Bidang pengembangan Wilayah, Fisik dan Prasarana yang dilaksanakan	Laporan	5	1	1	100	1	2	40
				Kegiatan penelitian mandiri bidang ekonomi dan pembangunan	Jumlah laporan penelitian mandiri fungsional peneliti bidang ekonomi dan pembangunan yang dilaksanakan	Laporan	30	6	5	100	6	11	36.6
07	01	47		Program Litbang Bidang Inovasi & Teknologi	Persentase rekomendasi yang dihasilkan litbang bidang inovasi dan teknologi	Persen	100	70	70	100	80	80	80
			01	Litbang Bidang Inovasi dan Teknologi	Jumlah laporan litbang sub bidang Inovasi dan pengembangan teknologi yang dilaksanakan	Laporan	5	1	1	100	1	2	40
					Jumlah laporan litbang sub bidang difusi inovasi dan penerapan teknologi yang dilaksanakan	Laporan	5	1	1	100	1	2	40

RENCANA KERJA (RENJA) TAHUN 2021

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes)/Kegiatan (output)		Target Kinerja Capaian Program (renstra PD) Tahun 2019-2023	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2019)			Target Program dan Kegiatan (Renja) Tahun 2020	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s/d Tahun Berjalan (2019- 2021)	
						Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2019	Realisasi Renja Tahun 2019	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2020	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra
1	2	3		4	5	6	7	8=7/6	9	10=(5+7+ 9)	11=(10/4)
		Jumlah laporan litbang sub bidang diseminasi kelitbangan yang dilaksanakan	Laporan	5		1	1	100	1	2	40
	Kegiatan penelitian mandiri bidang inovasi dan teknologi	Jumlah penelitian mandiri bidang inovasi dan teknologi	Laporan	17		4	5	100	1	5	29.4

Kelitbangan penelitian, pengkajian, pengembangan, perekayasa, penerapan, pengoperasian dan evaluasi kebijakan yang selanjutnya disebut **kelitbangan utama** adalah kegiatan ilmiah bertujuan menghasilkan pemahaman baru atau mengembangkan penerapan praktisnya dalam konteks ilmu pengetahuan dan teknologi lingkup penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Capaian target kinerja dan penyerapan anggaran program/kegiatan Renja Balitbangda Prov. Kaltim Triwulan IV (Oktober-Desember) merupakan anggaran DPA Perubahan Balitbangda Prov. Kaltim Tahun 2019, terdiri dari 8 (delapan)) program dan 14 (empat belas) kegiatan. Adapun penjelasan atau uraian capaian kinerja dan realisasi anggaran program dan kegiatan tersebut adalah sebagai berikut :

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran dengan indikator kinerja program berupa tingkat kepuasan pemangku kepentingan terhadap pelayanan PD (SKM), pada triwulan ke IV telah terealisasi 80% sesuai target kinerja (atau tercapai 100%). Capaian kinerja kegiatan berupa jumlah kegiatan pelaksanaan administrasi perkantoran sampai dengan triwulan IV terealisasi sebanyak 15 kegiatan. Adapun target indikator kinerja kegiatan tersebut terdiri dari 15 kegiatan dengan rincian sebagai berikut :

- a) Honorarium pengelola keuangan.
- b) Belanja ATK
- c) Belanja alat listrik dan elektronik.
- d) Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya.
- e) Belanja pengisian tabung pemadam kebakaran.
- f) Belanja telepon.
- g) Belanja air
- h) Belanja listrik
- i) Belanja surat kabar/majalah.
- j) Belanja kawat/faksimili/internet/TV kabel/TV satelit.
- k) Belanja paket/pengiriman.
- l) Belanja jasa tenaga teknis/non teknis.
- m) Belanja pajak kendaraan bermotor.
- n) Belanja cetak dan penggandaan
- o) Belanja penggandaan/fotocopy/penjilidan.

2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur dengan indikator kinerja program berupa unit kerja Perangkat Daerah yang memiliki kinerja pelayanan tepat waktu, sampai dengan triwulan ke IV telah mencapai target sebanyak 3 unit kerja yang memiliki kinerja pelayanan tepat waktu yang dinilai kinerjanya dari ketepatan menyelesaikan laporan akhir yakni :

- Bidang Inovasi dan teknologi
- Bidang Ekonomi dan Pembangunan
- Bidang Sosial dan Pemerintahan

Capaian kinerja kegiatan berupa jumlah kegiatan pemeliharaan peralatan dan perlengkapan sarana dan prasarana, pada triwulan IV telah terealisasi 7 kegiatan dan sampai dengan triwulan IV telah mencapai target sebanyak 8 kegiatan yang terlaksanakan.. Adapun indikator kinerja tersebut terdiri dari 8 (delapan) kegiatan yang akan selesai pada triwulan IV dengan rincian sebagai berikut :

- a) Honorarium tim pengadaan barang dan jasa.
- b) Belanja jasa pemeliharaan alat kantor dan gedung.
- c) Belanja pemeliharaan kantor dan taman.
- d) Belanja penggantian suku cadang.
- e) Belanja bahan bakar minyak/gas dan pelumas.
- f) Belanja pengadaan AC.
- g) Belanja modal gedung dan bangunan-pengadaan bangunan gedung untuk pos jaga.

3. Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pemerintah Daerah dengan indikator kinerja program dengan uraian persentase ASN yang memiliki standar kompetensi, sampai dengan triwulan IV terealisasi 20% dari target 80. Program sejatinya ditujukan untuk peningkatan kapasitas fungsional peneliti, namun karena keterbatasan anggaran dan pembiayaan bimtek dan diklat oleh penyelenggara kegiatan yang tidak sesuai anggaran maka tidak semua peneliti dapat mengikutinya. Program terdiri dari 2 (dua) kegiatan yaitu :

- a) Koordinasi dan Konsultasi Kelembagaan Pemerintah Daerah.

Kegiatan dengan indikator kinerja jumlah ASN yang mengikuti rapat koordinasi dan konsultasi, pada triwulan IV terealisasi sebanyak 51 orang dan sampai dengan triwulan IV terelisasi sebanyak 212 orang. Realisasi

capaian kinerja tercapai 158% karena capaian kinerja melebihi target kinerja kegiatan yakni 134 orang

b) Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur.

Kegiatan dengan indikator kinerja jumlah ASN yang mengikuti kegiatan peningkatan kualitas sumber daya aparatur berupa kursus-kursus singkat/pelatihan, sampai dengan triwulan IV terealisasi satu orang karena keterbatasan anggaran dan pembiayaan bimtek dan diklat oleh penyelenggara kegiatan yang tidak sesuai anggaran maka tidak semua peneliti dapat mengikutinya.

4. Program Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan dengan uraian indikator kinerja program Nilai Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah, sampai dengan triwulan IV nilai SAKIP masih bersifat sementara. Sejatinya nilai tersebut akan dievaluasi oleh Tim Inspektorat Prov. Kaltim pada tahun 2020 atau satu tahun setelah pelaksanaan anggaran. Pada acara Penerapan SAKIP Guna Mendukung Percepatan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Jakarta tanggal 21 Agustus 2019, penilaian sementara SAKIP Balitbangda Prov. Kaltim berada pada kisaran angka 59 (cc). Nilai tersebut menurun dari 64 (B) Tahun 2018 menjadi 59 (CC) Tahun 2019 karena uraian indikator kinerja utama yang belum optimal dan tidak terukur hasilnya, maka menindaklanjuti hal tersebut pada perubahan anggaran tahun 2019 Balitbangda telah melakukan revisi PK, IKU, RKT, Rencana Aksi yang telah disesuaikan pada laporan pengendalian dan evaluasi Renja Tahun 2019.

Program terdiri dari 2 kegiatan yakni :

- a) Kegiatan penyusunan dokumen perencanaan dan anggaran. Adapun target kinerja kegiatan adalah 10 dokumen perencanaan dan anggaran, yang terdiri dari :
- 1) DPA Tahun 2019,
 - 2) RKA Tahun 2019,
 - 3) DPA-P Tahun 2019,
 - 4) RKA-P Tahun 2019,
 - 5) Rancangan Renja Tahun 2020,
 - 6) Renja Tahun 2020,
 - 7) Perubahan Renja Tahun 2019,
 - 8) PK (IKU dan Kertas Kerja Ess II, III dan IV, RKT Tahun 2019)
 - 9) Rancangan Akhir Renstra Tahun 2019-2023,

10) Renstra Tahun 2019-2023.

Sampai dengan triwulan IV telah terealisasi sebanyak 10 dokumen perencanaan dan anggaran sesuai uraian tersebut di atas.

- b) Kegiatan Penyusunan Laporan Pengendalian dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah dengan indikator kinerja program jumlah laporan evaluasi pengendalian dan evaluasi pelaksanaan kegiatan, pada triwulan IV terealisasi 5 (lima) laporan yakni : Tepra Oktober-Desember Tahun 2019, SAKIP Triwulan IV, Laporan Evaluasi dan Pengendalian Renja Tahun 2019 triwulan IV, draft Laporan Kemajuan Fisik dan Keuangan Tahun 2019. Adapun indikator kinerja tersebut terdiri dari 23 (dua puluh tiga) laporan yakni :

- 1) LKjIP Tahun 2019
- 2) LPPD Tahun 2019
- 3) Tepra (Januari-Desember) tahun 2019/ 12 dokumen
- 4) SAKIP (triwulan I s.d IV tahun 2019)/4 dokumen
- 5) Laporan Evaluasi dan Pengendalian Renja Tahun 2019 (triwulan I s.d IV)/4 dokumen
- 6) Laporan Kemajuan Fisik dan Keuangan Tahun 2019.

Sampai dengan triwulan IV telah terealisasi sebanyak 23 laporan atau tercapai 100%.

5. Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi

Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi dengan indikator kinerja persentase teknologi yang dapat dimanfaatkan dengan optimal, sampai dengan triwulan IV terealisasi sebesar 80%. Program terdiri dari 2 (dua) kegiatan yaitu :

- a) Kegiatan Pengembangan Teknologi Informasi Kelitbangan.

Kegiatan mempunyai 2 (dua) indikator kinerja yaitu :

1. Persentase terselenggaranya program pemanfaatan teknologi informasi kelitbangan, pada triwulan IV terealisasi sebesar 20% berupa kegiatan website. Perhitungan target 80% diperoleh dari terselenggaranya kegiatan webhosting dan pengelolaan website. Sampai dengan triwulan IV telah terealisasi 80%.

2. Jumlah artikel jurnal riset pembangunan dan buletin lembusuaana, dengan rincian sebagai berikut : 10 artikel jurnal riset pembangunan, sebanyak 2 kali terbit (Agustus dan Desember 2018) dan 60 artikel buletin lembusuaana, sebanyak 12 kali terbit (Januari s.d Desember 2018). Pada triwulan IV terealisasi sebanyak 15 (delapan belas) artikel dan sampai dengan triwulan IV telah terealisasi 70 artikel atau tercapai 100%.

b) Kegiatan Rakorda Kelitbangan dengan indikator kinerja persentase terselenggaranya kegiatan Rakorda Kelitbangan sampai dengan triwulan IV telah terealisasi 100% pada bulan Juli, yang dilaksanakan di kabupaten Kutai Kertanegara, Tenggarong.

6. Program Litbang Bidang Sosial dan Pemerintahan

Program Litbang Bidang Sosial dan Pemerintahan dengan indikator kinerja persentase rekomendasi yang dihasilkan litbang bidang sosial dan pemerintahan sampai dengan triwulan IV tercapai 70%. Pemahaman dimaksud bahwa Bidang Sosial dan Pemerintahan telah menghasilkan rekomendasi sebesar 70%, karena rekomendasi memerlukan proses lebih lanjut untuk menjadi suatu kebijakan. Kendala lainnya yakni tidak adanya penelitian satu pintu yang artinya bahwa Perangkat Daerah lain juga melakukan penelitian, sehingga rekomendasi penelitian bukan hanya dari Balitbangda Prov. Kaltim. Hal ini yang menyebabkan bahwa rekomendasi tergantung pada pemerintah daerah yang akan memanfaatkan atau belum memanfaatkan rekomendasi tersebut.

Program terbagi dalam dua kegiatan yakni :

a) Litbang Bidang Sosial dan Pemerintahan, terdiri dari 3 (tiga) sub bidang :

- Sub Bidang Sosial Budaya dengan judul Optimalisasi Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) PD Se-Kaltim, sampai dengan triwulan IV laporan akhir telah selesai dilaksanakan.
- Sub Bidang Kependudukan, Pemberdayaan Masyarakat Desa dengan judul kegiatan Penilaian PD Terbaik Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2018, sampai dengan triwulan III telah selesai dilaksanakan pada bulan April, laporan akhir telah selesai dilaksanakan.
- Sub Bidang Penyelenggaraan Pemerintah dan Pengkajian Peraturan dengan judul kegiatan Penghargaan Panji-Panji Keberhasilan Pembangunan Kalimantan Timur, sampai dengan triwulan IV berada pada

progress kegiatan : rapat-rapat dan penilaian penghargaan panji-panji keberhasilan pembangunan Kalimantan Timur yang akan dilaksanakan pada bulan Januari bertepatan dengan HUT Prov. Kaltim Tahun 2020.

b) Penelitian Mandiri Bidang Sosial dan Pemerintahan.

Progress penelitian pada triwulan IV telah selesai sebanyak tujuh laporan akhir dengan judul kegiatan :

- a) Evaluasi Kebijakan Pembangunan Infrastruktur Wilayah Perbatasan Kabupaten Mahakam Ulu Provinsi Kalimantan Timur
- b) Penguatan peran DPRD Kaltim terhadap kinerja pemerintah daerah
- c) Pemetaan Sumber Daya Aparatur Desa Di Kalimantan Timur
- d) Evaluasi RPJMD Provinsi Kaltim Dengan RPJMD Kabupaten/Kota di Kaltim
- e) Kajian Naskah Akademik Perda Pelestarian Bahasa Daerah Di Kaltim
- f) Dana Desa, Urbanisasi, dan Kemandirian Desa
- g) Persepsi Kepala PD Terhadap Penilaian SKPD Terbaik

7. Program Litbang Bidang Ekonomi dan Pembangunan

Program Litbang Bidang Ekonomi dan Pembangunan dengan indikator kinerja persentase rekomendasi yang dihasilkan litbang bidang ekonomi dan pembangunan, sampai dengan triwulan IV tercapai 70%. Pemahaman dimaksud bahwa Bidang Ekonomi dan Pembangunan telah menghasilkan rekomendasi sebesar 70%, karena rekomendasi memerlukan proses lebih lanjut untuk menjadi suatu kebijakan. Kendala lainnya yakni tidak adanya penelitian satu pintu yang artinya bahwa Perangkat Daerah lain juga melakukan penelitian, sehingga rekomendasi penelitian bukan hanya dari Balitbangda Prov. Kaltim. Hal ini yang menyebabkan bahwa rekomendasi tergantung pada pemerintah daerah yang akan memanfaatkan atau belum memanfaatkan rekomendasi tersebut

Alokasi dana tersebut terbagi dalam 2 (dua) kegiatan sub bidang yakni :

- a) Litbang Bidang Ekonomi dan Pembangunan, terdiri dari 3 (tiga) sub bidang yakni :
 - Sub Bidang Ekonomi dengan judul kegiatan Dampak Penerapan Direct Call Terhadap Komoditas Lokal di Provinsi Kalimantan Timur, sampai dengan triwulan IV laporan akhir telah selesai dilaksanakan.

- Sub Bidang Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup dengan judul Sistem Informasi Data Sumber Daya Genetik Kalimantan Timur, sampai dengan triwulan IV laporan akhir telah selesai dilaksanakan. Namun realisasi fisik kegiatan hanya tercapai 48% karena sampai dengan triwulan IV belum ada persetujuan dari pimpinan untuk mengerjakan pembuatan aplikasi sistem informasi SDG pada kegiatan sumber daya alam dan lingkungan hidup
 - Sub Bidang Pengembangan wilayah fisik dan prasarana dengan judul kegiatan Evaluasi Sisa Umur Jalan Poros Samarinda-Bontang, sampai dengan triwulan IV laporan akhir telah selesai dilaksanakan.
 - b) Penelitian mandiri bidang ekonomi dan pembangunan, sampai dengan triwulan IV, laporan akhir telah selesai dilaksanakan sebanyak 6 laporan dengan judul kegiatan sebagai berikut :
 - a) Analisis Potensi dan Kontribusi Sektor Ekonomi Kreatif Terhadap Pendapatan Asli Daerah di Provinsi Kalimantan Timur (Studi Kasus di Kota Samarinda dan Kota Balikpapan)
 - b) Studi Pengelolaan Sampah Pasar Organik Untuk Mendukung Pertanian -Organik di Kota Samarinda
 - c) Identifikasi Kualitas Material Lokal Sebagai Bahan Bangunan dan Jalan)
 - d) Analisis Peramalan Jumlah Sampah di Samarinda
 - e) Analisis Peramalan Jumlah Permintaan Darah Di Kutai Kartanegara
 - f) Strategi Pengembangan Kawasan Sentra Produksi Padi di Kabupaten Kutai Kartanegara
8. Program Litbang Bidang Inovasi & Teknologi
- Program Litbang Bidang Inovasi & Teknologi dengan indikator kinerja persentase rekomendasi yang dihasilkan litbang bidang inovasi dan teknologi sampai dengan triwulan IV tercapai 70%. Pemahaman dimaksud bahwa Bidang Inovasi dan Teknologi telah menghasilkan rekomendasi sebesar 70%, karena rekomendasi memerlukan proses lebih lanjut untuk menjadi suatu kebijakan. Kendala lainnya yakni tidak adanya penelitian satu pintu yang artinya bahwa Perangkat Daerah lain juga melakukan penelitian, sehingga rekomendasi penelitian bukan hanya dari Balitbangda Prov. Kaltim. Hal ini yang menyebabkan bahwa rekomendasi tergantung pada pemerintah daerah yang akan memanfaatkan atau belum memanfaatkan rekomendasi tersebut.

Program terdiri dari 2 (dua) kegiatan yakni :

a) Litbang Bidang Inovasi dan Teknologi, terdiri dari 3 (tiga) sub bidang yakni :

- Sub Bidang Inovasi dan Pengembangan Teknologi, sampai dengan triwulan IV penyusunan laporan akhir telah selesai dilaksanakan dengan judul kegiatan Fasilitasi Pembangunan The Buluminung Nuclear Industry Science Technopark dan Gelar Inovasi Teknologi di Kalimantan Timur.
- Sub Bidang Difusi dan Penerapan Teknologi dengan judul kegiatan Konsolidasi, Koordinasi dan Teknologi pada Lembaga/Kementerian terkait, sampai dengan triwulan IV penyusunan laporan akhir telah selesai dilaksanakan.
- Sub Bidang Diseminasi Kelitbangan dengan judul kegiatan Inventarisasi Hasil Kelitbangan dan Inovasi., sampai dengan triwulan IV penyusunan laporan akhir telah selesai dilaksanakan..

b) Penelitian mandiri bidang Inovasi dan Teknologi , sampai dengan triwulan IV penyusunan Laporan Akhir telah selesai dilaksanakan dengan judul-judul kegiatan sebagai berikut :

- Pengaruh perlakuan dan jenis plastik terhadap kualitas minyak bakar.
- Perbandingan nilai CBR laboratorium antarakondisi terendam dan tidak terendam pada sampel agregat kelas A.
- Optimalisasi pengolahan bubuk kakao skala rumah tangga dengan simulasi.
- Pengaruh industri pertambangan batubara terhadap ketahanan pangan di Kalimantan Timur.
- Pada kegiatan anggaran perubahan penelitian mandiri dengan judul diseminasi hasil-hasil kelitbangan tidak dapat dilaksanakan karena ada beberapa kegiatan penelitian mandiri yang belum selesai sampai dengan triwulan IV.

Untuk melaksanakan tugas kelitbang tersebut, telah didukung dengan kesepakatan dan kerjasama berupa MoU dan PKS yang dilaksanakan tahun 2014, 2015, 2016 dan 2017 seperti tampak pada tabel 2.1.2 berikut :

Tabel 2.1.2
Monitoring dan Evaluasi (Monev) Kesepakatan dan Kerjasama
Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur

No.	PIHAK KERJASAMA	MASA BERLAKU	LINGKUP KERJASAMA	MONEV	MASALAH	TINDAK LANJUT
1.	MoU :					
	Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian Kementerian Pertanian Republik Indonesia	1 (Satu) Tahun, 28 April 2016 sd 28 April 2017	Kerjasama lingkup Litbang teknologi pertanian spesifik lokal berkelanjutan di Provinsi Kalimantan Timur	Terlaksana (rapat - rapat, koordinasi, konsolidasi)	Tidak ada	PKS antara Balitbangda Prov. Kaltim dengan Balai Teknologi Pertanian Kaltim
	PKS :					
	Balai Pengkajian Teknologi Pertanian Kalimantan Timur	7 (Tujuh) Bulan, 2 Mei 2016 sd 2 Desember 2016	<ul style="list-style-type: none"> - Menyusun data dan informasi kesesuaian beberapa jenis komoditas pertanian sesuai dengan kondisi agroekosistem wilayah. - Menyusun peta perwilayahan komoditas pertanian berdasarkan zona agrikologi skala 1 : 50.000 di Kab. PPU, Samarinda , Balikpapan dan Provinsi Kalimantan Timur. - Mengidentifikasi 	Terlaksana (rapat - rapat, koordinasi, konsolidasi)	Tidak ada	Selesai : kerjasama ditindaklanjuti melalui kegiatan “Perwilayahan Komoditas Pertanian Unggulan Daerah Dalam Mendukung Pengembangan Pertanian Di Kalimantan Timur Tahun 2016”

RENCANA KERJA (RENJA) TAHUN 2021

No.	PIHAK KERJASAMA	MASA BERLAKU	LINGKUP KERJASAMA	MONEV	MASALAH	TINDAK LANJUT
			komoditas unggulan di Provinsi Kalimantan Timur.			
2.	MoU :					
	Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara	12 (dua belas) bulan, mulai 02 Nopember 2016-02 Nopember 2017	Kerjasama kelitbangan di : - Bidang pemerintahan dan pengkajian peraturan - Bidang sosial ekonomi dan kependudukan - Bidang ekonomi dan pembangunan - Bidang inovasi dan teknologi	Terlaksana (rapat - rapat, koordinasi, konsolidasi)	Tidak ada	PKS antara Balitbangda Provinsi Kalimantan Timur dengan Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara
	Pemerintah Kabupaten Kutai Timur	12 (dua belas) bulan, mulai 02 Nopember 2016-02 Nopember 2017,	Kerjasama kelitbangan di : - Bidang pemerintahan dan pengkajian peraturan - Bidang sosial ekonomi dan kependudukan - Bidang ekonomi dan pembangunan - Bidang inovasi dan teknologi	Terlaksana (rapat - rapat, koordinasi, konsolidasi)	Tidak ada	PKS antara Balitbangda Provinsi Kalimantan Timur dengan Pemerintah Kabupaten Kutai Timur

RENCANA KERJA (RENJA) TAHUN 2021

No.	PIHAK KERJASAMA	MASA BERLAKU	LINGKUP KERJASAMA	MONEV	MASALAH	TINDAK LANJUT
	PKS :					
	Balitbangda Kabupaten Kutai Kartanegara	5 (lima) Tahun, 2 Nopember 2016 sd 2 November 2021	Kerjasama kelitbangan di : - Bidang pemerintahan dan pengkajian peraturan - Bidang sosial ekonomi dan kependudukan - Bidang ekonomi dan pembangunan - Bidang inovasi dan teknologi	Terlaksana (rapat - rapat, koordinasi, konsolidasi)	Kebijakan rasionalisasi anggaran berdampak pada terhambatnya koordinasi dan konsolidasi kerjasama. dengan Balitbangda Kabupaten Kutai Kartanegara	Bertukar data dan informasi kelitbangan dan mengaplikasikan hasil kelitbangan untuk kesejahteraan masyarakat dalam bentuk : - Sosialisasi perubahan nomenclatur pada OPD Balitbangda di Provinsi Kalimantan Timur.
	Balitbangda Kabupaten Kutai Timur	5 (lima) Tahun, 2 Nopember 2016 sd 2 November 2021	Kerjasama kelitbangan di : - Bidang pemerintahan dan pengkajian peraturan - Bidang sosial ekonomi dan kependudukan - Bidang ekonomi dan pembangunan - Bidang inovasi dan teknologi	Terlaksana (rapat - rapat, koordinasi, konsolidasi)	Kebijakan rasionalisasi anggaran berdampak pada terhambatnya koordinasi dan konsolidasi kerjasama.dengan Balitbangda Kabupaten Kutai Timur	- Sosialisasi hasil-hasil Ristek Aplikatif yang berbasis komoditas - Sosialisasi komoditas jelai sebagai salah satu potensi sumber pangan yang dapat dibudidayakan di Kalimantan Timur. - Sosialisasi komoditas kakao sebagai bahan

RENCANA KERJA (RENJA) TAHUN 2021

No.	PIHAK KERJASAMA	MASA BERLAKU	LINGKUP KERJASAMA	MONEV	MASALAH	TINDAK LANJUT
						<p>baku pembuatan coklat dan permen guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat khususnya petani kakao.</p> <p>- Untuk PKS antara Balitbangda Prov. Kaltim dengan Balitbangda Kab. Kutai Timur dalam proses menuju kerjasama tripartit.</p>
3.	MoU :					
	Provinsi Kalimantan Selatan, Provinsi Jawa Timur, Provinsi Bali, Provinsi NTB, Provinsi Sulawesi Selatan, Provinsi Sulawesi Barat, Provinsi Sulawesi Tengah, Provinsi Sulawesi Utara, Provinsi Gorontalo, Dan Provinsi Kalimantan Utara	5 (lima) tahun, mulai 15 Desember 2014-15 Desember 2019	<p>Pengembangan potensi kawasan di sekitar yang dilalui ALKI-II di bidang :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Bidang Kelautan dan Perikanan, - Bidang Perhubungan, - Bidang Pariwisata, - Bidang SDM dan Iptek, - Bidang Perdagangan, - Bidang PU dan Infrastruktur - Bidang Lingkungan Hidup 	Terlaksana (rapat - rapat, koordinasi, konsolidasi)	Kebijakan rasionalisasi anggaran berdampak pada terhambatnya koordinasi dan konsolidasi antara pihak kerjasama	PKS antara Balitbangda Provinsi Kalimantan Timur dengan Provinsi Sulawesi Tengah

RENCANA KERJA (RENJA) TAHUN 2021

No.	PIHAK KERJASAMA	MASA BERLAKU	LINGKUP KERJASAMA	MONEV	MASALAH	TINDAK LANJUT
			- Bidang lainnya yang dapat dikembangkan di kawasan ALKI-II			
	PKS :					
	Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah	5 (lima) tahun , mulai 12 November 2016 sd 12 November 2021.	1. Kelitbangan dan inovasi pada 8 bidang : <ul style="list-style-type: none"> - Bidang Kelautan dan Perikanan, - Bidang Perhubungan, - Bidang Pariwisata, - Bidang SDM dan Iptek, - Bidang Perdagangan, - Bidang PU dan Infrastruktur - Bidang Lingkungan Hidup - Bidang lainnya yang dapat dikembangkan di kawasan ALKI-II 2. Kerjasama workshop/seminar dan kegiatan lainnya 3. Mengadakan pertemuan secara berkala dan berkelanjutan	Terlaksana (rapat - rapat, koordinasi, konsolidasi)	Kebijakan rasionalisasi anggaran berdampak pada terhambatnya koordinasi dan konsolidasi kerjasama.	Sedang berjalan

RENCANA KERJA (RENJA) TAHUN 2021

No.	PIHAK KERJASAMA	MASA BERLAKU	LINGKUP KERJASAMA	MONEV	MASALAH	TINDAK LANJUT
4.	Fakultas Pertanian Universitas Mataram	3 (tiga) tahun mulai 24 Juli 2014 – 24 juli 2017	Bidang penelitian dan pengembangan ketahanan pangan, tanaman penghasil gaharu dan teknologi produksi gubal gaharu	Terlaksana (rapat - rapat, koordinasi, konsolidasi)	Kebijakan rasionalisasi anggaran berdampak pada terhambatnya koordinasi dan konsolidasi kerjasama.	Kegiatan terlaksana dalam bentuk kegiatan pengembangan gaharu di Kalimantan Timur, namun rasionalisasi anggaran PKS tidak dapat dilanjutkan.
5.	Pusat Aplikasi ISOTOP dan Radiasi BATAN	3 (tiga) tahun mulai 6 maret 2015 – 6 maret 2018	<ul style="list-style-type: none"> - Pemanfaatan hasil penelitian dan pengembangan pada sector pertanian, kesehatan, industry dan lingkungan - Aplikasi isotop dan radiasi untuk perbaikan varietas tanaman local dan penelitian tanaman berkhasiat obat. - Aplikasi isotop dan radiasi untuk pengolahan limbah pertanian dan perikanan sebagai pupuk, pestisida hayati, stimulant tanaman dan pakan ternak. 	Terlaksana (rapat - rapat, koordinasi, konsolidasi)	Kebijakan rasionalisasi anggaran berdampak pada terhambatnya koordinasi dan konsolidasi kerjasama.	<ul style="list-style-type: none"> - Ditindaklanjuti dengan program <i>The Biluminung Nuclear Industrial – Science Tehcno Park</i> (BNI-STP) - Rapat koordinasi dan sinkronisasi rencana program pembangunan BNI-STP dengan BATAN sebanyak 2 kali di Jakarta pada tanggal 8 Pebruari 2017 dan PPU pada tanggal 11 April 2017.

RENCANA KERJA (RENJA) TAHUN 2021

No.	PIHAK KERJASAMA	MASA BERLAKU	LINGKUP KERJASAMA	MONEV	MASALAH	TINDAK LANJUT
			- Aplikasi radiasi untuk pengawetan makanan.			- Rencana usulan kerjasama dengan PT. BATAN, PT. INOKI dan BUMN Rusia Rosaton.
6.	Pusat Penelitian dan Pengembangan Jalan dan Jembatan Balitbang Kementerian Pekerjaan Umum	3 Tahun (2 Juni 2014 sd 2 Juni 2017)	<ul style="list-style-type: none"> - Peningkatan kapasitas penelitian dan pengembangan bidang infrastruktur jalan dan jembatan melalui pelatihan sumber daya manusia dan bentuk <i>in-house training</i> atau <i>on job training</i>. - Penelitian Bersama (<i>Joint Research</i>) - Tukar menukar informasi hasil litbang dan standarisasi konstruksi - Advis Teknik teknologi jalan dan jembatan - Joint workshop/seminar/sarasehan dan kegiatan relevan lainnya di bidang jalan dan jembatan 	Terlaksana (rapat - rapat, koordinasi, konsolidasi)	Jangka waktu MoU dengan Kementerian PU sudah berakhir pada tahun 2014, maka berdampak terhadap pelaksanaan PKS selanjutnya.	Sedang dalam proses perpanjangan MoU sehingga PKS dapat dilanjutkan kembali

RENCANA KERJA (RENJA) TAHUN 2021

No.	PIHAK KERJASAMA	MASA BERLAKU	LINGKUP KERJASAMA	MONEV	MASALAH	TINDAK LANJUT
7.	Pusat Penelitian dan Pengembangan Sumber Daya Air Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PKS)	3 (Tiga) Tahun (24 Maret 2015 sd 24 Maret 2018)	<ul style="list-style-type: none"> - Peningkatan kapasitas penelitian dan pengembangan sumber daya air melalui pelatihan sumber daya manusia (SDM) dalam bentuk in house training dan on job the -training. - Penelitian Bersama (Joint Research) bidang sumber daya air. - Advis teknis dalam bidang sumber daya air. - Pelatihan dan praktek kerja penggunaan alat laboratorium bidang sumber daya air. - Joint workshop/seminar/sarasehan dan kegiatan lainnya di bidang sumber daya air - Sharing data terkait bidang sumber daya air 	Terlaksana (rapat - rapat, koordinasi, konsolidasi)		
8.	Universitas Brawijaya Malang	1 (Satu) Tahun (21 Juni 2016 sd 21 Juni 2017)	Bidang pendidikan, penelitian, peningkatan kualitas sumber daya manusia dan ilmu	Terlaksana (rapat - rapat, koordinasi, konsolidasi)	Kebijakan rasionalisasi anggaran berdampak pada	Terkait rasionalisasi anggaran, kegiatan hanya dilanjutkan dengan menginisiasi

RENCANA KERJA (RENJA) TAHUN 2021

No.	PIHAK KERJASAMA	MASA BERLAKU	LINGKUP KERJASAMA	MONEV	MASALAH	TINDAK LANJUT
			pengetahuan dan sosial budaya dan kepariwisataan		terhambatnya koordinasi dan konsolidasi kerjasama.	perintah direktif Gubernur Kaltim mengenai persiapan relokasi binatang-binatang peliharaan PT. Gunung Bayan Kab. Kutai Barat ke Kaltim Zoo dengan bekerjasama dengan pihak Jatim Park.

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Analisis kinerja pelayanan perangkat daerah adalah pengkajian terhadap capaian kinerja pelayanan perangkat daerah dengan kinerja yang dibutuhkan sesuai dengan dampak yang ditimbulkan atas kinerja pelayanan tersebut, serta mengidentifikasi permasalahan yang dihadapi untuk penyusunan program dan kegiatan dalam rangka peningkatan pelayanan perangkat daerah sesuai dengan tugas dan fungsi.

Tabel 2.2.1

Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Balitbangda Prov. Kaltim

No.	Indikator	SPM/ standar nasional	IKK	Target Renstra Perangkat Daerah					Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
				Tahun 2019 (n-2)	Tahun 2020 (n-1)	Tahun 2021 (n)	Tahun 2022 (n+1)	Tahun 2023 (n+2)	Tahun 2019 (n-3)	Tahun 2020 (n-2)	Tahun 2020 (n-1)	Tahun 2021 (n)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(6)	(7)	(8)	(9)		(11)	(12)	(13)	(14)	(16)
1	Tingkat kepuasan pemangku kepentingan terhadap pelayanan PD (SKM)			80%	85%	90%	95%	100%	80%	85%	85%	90%	
2	Jumlah kegiatan pelaksanaan administrasi perkantoran			15 kegiatan	15 kegiatan	15 kegiatan	15 kegiatan	15 kegiatan	15 kegiatan	15 kegiatan	15 kegiatan	14 kegiatan	
3	Unit kerja PD yang memiliki kinerja pelayanan tepat waktu			2 unit kerja	3 unit kerja	4 unit kerja	5 unit kerja	5 unit kerja	2 unit kerja	3 unit kerja	3 unit kerja	4 unit kerja	
4	Jumlah kegiatan pemeliharaan peralatan dan perlengkapan sarana dan prasarana			8 kegiatan	8 kegiatan	8 kegiatan	8 kegiatan	8 kegiatan	8 kegiatan	8 kegiatan	8 kegiatan	17 kegiatan	
5	Persentase yang memiliki ASN yang memiliki standar kompetensi			80%	81 %	82%	83%	85%	80%	81 %	81 %	82%	

RENCANA KERJA (RENJA) TAHUN 2021

No.	Indikator	SPM/ standar nasional	IKK	Target Renstra Perangkat Daerah					Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
				Tahun 2019 (n-2)	Tahun 2020 (n-1)	Tahun 2021 (n)	Tahun 2022 (n+1)	Tahun 2023 (n+2)	Tahun 2019 (n-3)	Tahun 2020 (n-2)	Tahun 2020 (n-1)	Tahun 2021 (n)	
6	Jumlah ASN yang melaksanakan kegiatan rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam dan luar daerah			77 Orang	130 Orang	155 Orang	180 Orang	205 Orang	77 Orang	130 Orang	130 Orang	283 Orang	
7	Jumlah ASN yang mengikuti kegiatan peningkatnya Kualitas Sumber Daya Aparatur			10 orang	11 orang	12 orang	13 orang	13 Orang	10 orang	11 orang	12 orang	15 orang	
8	Nilai akuntabilitas kinerja PD			78 (BB)	79 (BB)	79 (BB)	80 (A)	81 (A)	56 (C)	70 (B)	70 (B)	71 (B)	
9	Jumlah dokumen perencanaan dan anggaran			10 dokumen	10 dokumen	10 dokumen	10 dokumen	10 dokumen	10 dokumen	10 dokumen	10 dokumen	10 dokumen	
10	Jumlah laporan evaluasi pengendalian dan evaluasi pelaksanaan kegiatan			23 laporan	23 laporan	23 laporan	23 laporan	23 laporan	23 laporan	23 laporan	23 laporan	23 laporan	
11	Persentase teknologi yang dapat dimanfaatkan dengan optimal			80%	80%	80%	80%	80%	80%	80%	80%	80%	
12	Persentase terselenggaranya program pemanfaatan teknologi informasi kelitbangan			80%	80%	80%	80%	80%	80%	80%	80%	80%	
13	Jumlah artikel jurnal riset pembangunan dan bulletin lembusuaana			70 artikel	70 artikel	70 artikel	70 artikel	70 artikel	70 artikel	70 artikel	70 artikel	10 artikel	
14	Persentase terselenggaranya kegiatan Rakorda Kelitbangan			100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
15	Persentase rekomendasi yang dihasilkan litbang bidang sosial dan pemerintahan			70%	80%	90%	95%	100%	70%	80%	80%	90%	

No.	Indikator	SPM/ standar nasional	IKK	Target Renstra Perangkat Daerah					Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
				Tahun 2019 (n-2)	Tahun 2020 (n-1)	Tahun 2021 (n)	Tahun 2022 (n+1)	Tahun 2023 (n+2)	Tahun 2019 (n-3)	Tahun 2020 (n-2)	Tahun 2020 (n-1)	Tahun 2021 (n)	
16	Jumlah laporan Litbang Sub Bidang Kependudukan, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Yang Dilaksanakan			1 laporan	1 laporan	1 laporan	1 laporan	1 laporan	1 laporan	1 laporan	1 laporan	3 laporan	
17	Jumlah laporan Litbang Sub Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan Yang Dilaksanakan			1 laporan	1 laporan	1 laporan	1 laporan	1 laporan	1 laporan	1 laporan	1 laporan	2 laporan	
18	Jumlah laporan Litbang Sub Bidang Sosial Dan Budaya Yang Dilaksanakan			1 laporan	1 laporan	1 laporan	1 laporan	1 laporan	1 laporan	1 laporan	1 laporan	2 laporan	
19	Jumlah laporan penelitian mandiri bidang social dan pemerintahan			7 laporan	7 laporan		7 laporan	7 laporan	7 laporan	6 laporan	6 laporan		
20	Persentase rekomendasi yang dihasilkan litbang bidang ekonomi dan pembangunan			70%	80%	90%	95%	100%	70%	80%	80%	90%	
21	Jumlah Laporan Litbang Sub Bidang Ekonomi yang dilaksanakan			1 laporan	1 laporan	1 laporan	1 laporan	1 laporan	1 laporan	1 laporan	1 laporan	1 laporan	
22	Jumlah Laporan Litbang Sub Bidang Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup yang dilaksanakan			1 laporan	1 laporan	1 laporan	1 laporan	1 laporan		1 laporan	1 laporan	1 laporan	
23	Jumlah laporan Litbang Sub Bidang pengembangan Wilayah, Fisik dan Prasarana yang dilaksanakan			1 laporan	1 laporan	1 laporan	1 laporan	1 laporan	1 laporan	1 laporan	1 laporan	1 laporan	
24	Jumlah Laporan penelitian mandiri bidang ekonomi dan pembangunan			5 laporan	6 laporan	6 laporan	6 laporan	6 laporan	5 laporan	6 laporan	6 laporan		
25	Persentase rekomendasi yang dihasilkan litbang bidang inovasi dan teknologi			70%	80%	90%	95%	100%	70%	80%	80%	90%	
26	Jumlah laporan litbang sub bidang Inovasi dan pengembangan teknologi yang dilaksanakan			1 laporan	1 laporan	1 laporan	1 laporan	1 laporan	1 laporan	1 laporan	1 laporan	1 laporan	
27	Jumlah laporan litbang sub bidang difusi inovasi dan penerapan teknologi yang dilaksanakan			1 laporan	1 laporan	1 laporan	1 laporan	1 laporan	1 laporan	1 laporan	1 laporan	2 laporan	

RENCANA KERJA (RENJA) TAHUN 2021

No.	Indikator	SPM/ standar nasional	IKK	Target Renstra Perangkat Daerah					Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
				Tahun 2019 (n-2)	Tahun 2020 (n- 1)	Tahun 2021 (n)	Tahun 2022 (n+1)	Tahun 2023 (n+2)	Tahun 2019 (n- 3)	Tahun 2020 (n- 2)	Tahun 2020 (n- 1)	Tahun 2021 (n)	
28	Jumlah laporan litbang sub bidang diseminasi kelitbangan yang dilaksanakan			1 laporan	1 laporan	1 laporan	1 laporan	1 laporan	1 laporan	1 laporan	1 laporan	1 laporan	
29	Jumlah laporan penelitian mandiri bidang inovasi dan teknologi			4 laporan	1 laporan	4 laporan	4 laporan	4 laporan	4 laporan	1 laporan	4 laporan	1 laporan	

2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

Isu Strategis Balitbangda Provinsi Kaltim :

1. Penetapan Provinsi Kalimantan Timur Sebagai Ibu Kota Negara.
2. Peningkatan Kinerja Balitbangda Sesuai Tugas Pokok dan Fungsinya.
3. Pemanfaatan Optimal Hasil Penelitian untuk Pembangunan dan Kesejahteraan Masyarakat.

Bahwa berdasarkan issue strategis tersebut maka permasalahan yang terkait dengan pelayanan litbang dan faktor-faktor yang mempengaruhi yang dapat diidentifikasi berdasarkan analisis gambaran pelayanan litbang secara internal dan eksternal dapat dijabarkan sebagaimana tabel 2.3.1 berikut :

Tabel 2.3.1

Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Balitbangda Prov. Kaltim

Aspek Kajian	Capaian/Kondisi saat ini	Standar yang digunakan	Faktor yang mempengaruhi		Permasalahan Pelayanan PD
			Internal (kewenangan PD)	Eksternal (diluar kewenangan PD)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Gambaran Pelayanan PD.	1. Pelaksanaan Litbang Bidang Sosial dan Pemerintahan, Bidang Ekonomi dan Pembangunan, , Bidang Inovasi dan Teknologi.	1. Standar kebutuhan pelayanan yang dikembangkan secara mandiri sesuai tugas dan fungsi PD.	1. Komitmen Kepala Daerah Sangat Kuat 2. Kedudukan Balitbangda Sangat Strategis 3. Komitmen Pimpinan Kuat 4. Kualitas SDM Peneliti 5. Belum Optimalnya Koordinasi, Integrasi dan Sinkronisasi Kegiatan Litbang 6. Belum adanya perda penelitian satu pintu 7. Terbatasnya prasarana dan sarana penunjang penelitian (lahan, laboratorium, database litbang).	1. Adanya pemindahan IKN ke Kaltim 2. Perkembangan Riset, Ilmu Pengetahuan dan Teknologi 3. Tersedianya SDM Peneliti di Luar Balitbangda 4. Adanya peraturan tentang SIDA 5. Adanya asosiasi peneliti di kaltim 6. Tersedianya dana dari lembaga litbang partnership 7. Peraturan Perundangan Yang Sering Berubah-ubah	1. Belum ada kebijakan satu pintu mengenai kegiatan litbang, masih tersebar di OPD. 2. Belum dikembangkan data base hasil penelitian dan pengembangan di lembaga litbang. 3. Hasil - hasil litbang belum mendapat perhatian dan dukungan dari para pihak. 4. Terbatasnya jumlah peneliti dan bidang kepakarannya yang menunjang dengan kebutuhan program strategis pemerintahan provinsi. 5. Terbatasnya prasarana dan sarana penunjang penelitian (laboratorium, database litbang, perpustakaan, dan lain-lain).

Aspek Kajian	Capaian/Kondisi saat ini	Standar yang digunakan	Faktor yang mempengaruhi		Permasalahan Pelayanan PD
			Internal (kewenangan PD)	Eksternal (diluar kewenangan PD)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
			8. Belum adanya rencana induk kelitbangan. 9. Belum dijadikannya rekomendasi hasil kelitbangan sebagai dasar perencanaan pembangunan daerah. 10. Belum dilaksanakannya SIDa secara optimal. 11. Kuantitas SDM Peneliti belum optimal 12. Lemahnya jejaring kerja	8. Adanya rekomendasi peneltian yang dilakukan opd lain 9. Persaingan di Era Globalisasi 10. Persepsi stakeholders yang kurang responsif 11. Dampak bertambahnya jumlah penduduk, sosial ekonomi, lingkungan, air bersih, listrik dan ASN dari luar daerah	6. Belum optimalnya koordinasi dengan kab/kota terkait dengan fungsi litbang yang disebabkan belum terbentuknya lembaga litbang di beberapa kab/kota di Kaltim. 7. Belum tersusunnya Grand Design dan road map penelitian dan pengembangan di daerah.

RENCANA KERJA (RENJA) TAHUN 2021

Aspek Kajian	Capaian/Kondisi saat ini	Standar yang digunakan	Faktor yang mempengaruhi		Permasalahan Pelayanan PD
			Internal (kewenangan PD)	Eksternal (diluar kewenangan PD)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
			13. Belum dikembangkan data base hasil penelitian terintegrasi dan pengembangan di lembaga litbang. 14. Belum optimalnya koordinasi dengan kab/kota terkait dengan fungsi litbang yang disebabkan belum terbentuknya lembaga litbang di beberapa kab/kota di Kaltim 15. Belum adanya database peneliti. 16. Tidak adanya respon dari opd teknis terkait dalam pengajuan penelitian		

Ditinjau dari permasalahan tersebut maka permasalahan yang terkait dengan pelayanan litbang dan faktor-faktor yang mempengaruhi yang dapat diidentifikasi berdasarkan analisis gambaran pelayanan litbang secara internal dan eksternal dapat dijabarkan sebagaimana

Faktor internal yang mempengaruhi isu-isu strategis atau permasalahan tersebut yaitu :

1. Komitmen Kepala Daerah Sangat Kuat
2. Kedudukan Balitbangda Sangat Strategis
3. Komitmen Pimpinan Kuat
4. Kualitas SDM Peneliti
5. Belum Optimalnya Koordinasi, Integrasi dan Sinkronisasi Kegiatan Litbang
6. Belum adanya perda penelitian satu pintu
7. Terbatasnya prasarana dan sarana penunjang penelitian (lahan, laboratorium, database litbang).
8. Belum adanya rencana induk kelitbang.
9. Belum dijadikannya rekomendasi hasil kelitbang sebagai dasar perencanaan pembangunan daerah.
10. Belum dilaksanakannya SIDA secara optimal.
11. Kuantitas SDM Peneliti belum optimal
12. Lemahnya jejaring kerja
13. Belum dikembangkan data base hasil penelitian terintegrasi dan pengembangan di lembaga litbang.
14. Belum optimalnya koordinasi dengan kab/kota terkait dengan fungsi litbang yang disebabkan belum terbentuknya lembaga litbang di beberapa kab/kota di Kaltim
15. Belum adanya database peneliti.
16. Tidak adanya respon dari opd teknis terkait dalam pengajuan penelitian

Faktor eksternal yang mempengaruhi isu-isu strategis atau permasalahan tersebut yaitu :

1. Adanya pemindahan IKN ke Kaltim
2. Perkembangan Riset, Ilmu Pengetahuan dan Teknologi
3. Tersedianya SDM Peneliti di Luar Balitbangda
4. Adanya peraturan tentang SIDA
5. Adanya asosiasi peneliti di kaltim
6. Tersedianya dana dari lembaga litbang partnership

7. Peraturan Perundangan Yang Sering Berubah-ubah
8. Adanya rekomendasi penelitian yang dilakukan opd lain
9. Persaingan di Era Globalisasi
10. Persepsi stakeholders yang kurang responsif
11. Dampak bertambahnya jumlah penduduk, sosial ekonomi, lingkungan, air bersih, listrik dan ASN dari luar daerah

Aspek strategis organisasi Balitbangda telah didukung dengan berbagai kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah pusat ataupun pemerintah daerah, sebagai berikut :

1. Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 2017 tentang Inovasi Daerah.
2. Surat edaran Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 060/2700/Litbang tanggal 1 September 2016 perihal Pedoman Arah Penataan Kelembagaan Litbang di Lingkungan Pemda Sesuai PP No. 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah.
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2016 tentang Pedoman Penelitian dan Pengembangan di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah.
4. Peraturan Daerah Kalimantan Timur Nomor 9 Tahun 2016, Tanggal 26 November 2016, Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Timur.
5. Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 81 Tahun 2016 Tentang Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Balitbangda Prov. Kaltim.

Berdasarkan aspek strategis tersebut maka Balitbangda Prov. Kaltim memiliki tugas yaitu membantu Gubernur melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah di bidang penelitian dan pengembangan, dengan fungsinya yaitu :

1. Perumusan kebijakan teknis penelitian dan pengembangan sesuai dengan rencana strategis yang ditetapkan pemerintah daerah;
2. Perencanaan, pembinaan dan pengendalian kebijakan teknis di bidang penelitian dan pengembangan;
3. Penyelenggaraan urusan pemerintah dan pelayanan umum di bidang penelitian dan pengembangan;

4. Perumusan, perencanaan, pembinaan dan pengendalian kebijakan teknis di bidang social dan pemerintahan;
5. Perumusan, perencanaan, pembinaan dan pengendalian kebijakan teknis di bidang ekonomi dan pembangunan;
6. Perumusan, perencanaan, pembinaan dan pengendalian kebijakan teknis di bidang inovasi dan teknologi;
7. Penyelenggaraan urusan kesekretariatan;
8. Pelaksanaan Unit Pelaksana Teknis Daerah;
9. Pembinaan kelompok jabatan fungsional; dan
10. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Gubernur sesuai tugas dan fungsinya.

Permasalahan secara umum dan solusi terkait dengan kelitbang (kesekretariatan, litbang bidang sosial dan pemerintahan, litbang bidang ekonomi dan pembangunan, litbang bidang inovasi dan teknologi, litbang bidang ekonomi dan pembangunan, laboratorium konstruksi). Permasalahan atau kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan kegiatan kelitbang yaitu :

1. Program kegiatan litbang yang dilaksanakan oleh masing-masing bidang-bidang masih terfokus pada 2 (dua) kegiatan kelitbang utama yakni kegiatan penelitian, pengkajian dan pengembangan belum masuk ke ranah perekayasaan, penerapan, pengoperasian dan evaluasi kebijakan sehingga pengukuran capaian kinerja bidang masih belum optimal.
2. Belum ada kebijakan satu pintu mengenai kegiatan litbang dan masih tersebar di perangkat daerah.
3. Hasil-hasil kajian litbang belum mendapat perhatian dan dukungan sepenuhnya oleh user.
4. Jumlah peneliti yang kurang menunjang dengan kebutuhan program strategis Pemerintah Daerah
5. Belum maksimalnya jejaring kerja antar instansi kelitbang di Kab./Kota di Kaltim, karena baru ada 3 instansi litbang di kab/kota yaitu Balitbangda Kab. Kukar, Balitbangda Kab. Kutim dan Balitbangda Kota Samarinda sedangkan kab/kota lainnya fungsi litbang masih melekat di Bappeda/Badan Diklat.
6. Masih terbatasnya sarana dan prasarana pelayanan jasa laboratorium pengujian bidang konstruksi terutama peralatan yang sudah tua dan gedung laboratorium yang tidak memenuhi syarat.

7. Terbatasnya anggaran kelitbangan yang menghambat penyelenggaraan kegiatan penelitian dan pengembangan daerah.

Adapun upaya yang perlu dilakukan untuk mengatasi permasalahan tersebut adalah :

1. Menghasilkan Penelitian yang Berkualitas dan Dapat Dipertanggungjawabkan.
2. Meningkatkan Kualitas dan Kuantitas Pembangunan Daerah.
3. Mewujudkan Konektivitas Pembangunan Antar Daerah Kabupaten / Kota.
4. Memberikan Informasi dan Data Akurat Berdasarkan Hasil Penelitian Mengoptimalkan Sumber Daya untuk Peningkatan Kelitbangan.
5. Sosialisasi Permendagri No. 17 Tahun 2016 dan berkoordinasi terus menerus dengan Balitbang Kementerian Dalam Negeri, guna menetapkan kebijakan satu pintu mengenai kegiatan kajian dan litbang di daerah.
6. Meningkatkan kualitas kajian dan litbang sesuai dengan kebutuhan daerah dan mengacu pada RPJMD Provinsi Kalimantan Timur.
7. Meningkatkan kuantitas dan kualitas fungsional peneliti dan perekayasa sesuai dengan kebutuhan daerah melalui pelatihan dan bimbingan teknis.
8. Sosialisasi Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2017 tentang Inovasi Daerah.
9. Meningkatkan kapasitas SDM kelitbangan melalui diklat, seminar, workshop, diseminasi, lokakarya, semiloka dll.
10. Menindaklanjuti perjanjian kerjasama kelitbangan dengan Badan Litbang Kabupaten/Kota terkait.

2.4. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2021

Penyusunan Rancangan Awal RKPD Tahun 2021 mengacu pada arah kebijakan dan sasaran pokok RPJPD periode keempat dan atau RPJMD untuk periode 2019-2023. Rancangan Awal RKPD Tahun 2021 tersebut harus menjadi satu kesatuan dan bagian tak terpisahkan dari kebijakan dan indikasi program prioritas dalam RPJMD Tahun 2019-2023. Selanjutnya, RKPD dimaksud digunakan sebagai pedoman untuk menyusun APBD 2021. Untuk itu review Rancangan Awal RKPD Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2021 masih berkesinambungan dengan Rencana Kerja tahun berjalan (2020) sebagaimana tabel 2.4.1 berikut :

Tabel 2.4.1
Review terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2021

Perangkat Daerah : Balitbangda Prov. Kaltim

No.	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp. 000)	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp. 000)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
1	Program pelayanan administrasi perkantoran	Air Putih, Kec. Samarinda Ulu, Samarinda	Tingkat kepuasan pemangku kepentingan terhadap pelayanan PD (SKM)	90 %	1.300.000.000	Program pelayanan administrasi perkantoran	Air Putih, Kec. Samarinda Ulu, Samarinda	Tingkat kepuasan pemangku kepentingan terhadap pelayanan PD (SKM)	90 %	1.300.000.000	
2	Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	Air Putih, Kec. Samarinda Ulu, Samarinda	Unit kerja PD yang memiliki kinerja pelayanan tepat waktu	4 unit	800.000.000	Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	Air Putih, Kec. Samarinda Ulu, Samarinda	Unit kerja PD yang memiliki kinerja pelayanan tepat waktu	4 unit	800.000.000	
3	Program peningkatan kapasitas kelembagaan pemerintah daerah	Dalam dan Luar Wilayah Provinsi Kaltim	Persentase yang memiliki ASN yang memiliki standar kompetensi	82 %	950.550.000	Program peningkatan kapasitas kelembagaan pemerintah daerah		Persentase yang memiliki ASN yang memiliki standar kompetensi	82%	950.550.000	
4	Program penyusunan dokumen perencanaan, pengendalian dan evaluasi penyelenggaraan pemerintahan	Balikpapan dan Kutim	Nilai akuntabilitas kinerja PD	79 BB	35.000.000	Program penyusunan perencanaan, pengendalian dan evaluasi penyelenggaraan pemerintahan		Nilai akuntabilitas kinerja PD	79 BB	35.000.000	

RENCANA KERJA (RENJA) TAHUN 2021

No.	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp. 000)	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp. 000)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
5.	Program optimalisasi pemanfaatan teknologi	Samarinda	Persentase teknologi yang dapat dimanfaatkan dengan optimal	80%	720.950.000	Program optimalisasi pemanfaatan teknologi	Samarinda	Persentase teknologi yang dapat dimanfaatkan dengan optimal	80%	720.950.000	
6	Program litbang bidang ekonomi dan pembangunan	Dalam dan luar wilayah Kaltim	Persentase rekomendasi yang dihasilkan litbang bidang ekonomi dan pembangunan	90%	1.350.000.000	Program litbang bidang ekonomi dan pembangunan	Dalam dan luar wilayah Kaltim	Persentase rekomendasi yang dihasilkan litbang bidang ekonomi dan pembangunan	90%	1.350.000.000	
7.	Program litbang bidang inovasi dan teknologi	Dalam dan luar wilayah Kaltim	Persentase rekomendasi yang dihasilkan litbang bidang inovasi dan teknologi	90%	1.400.000.000	Program litbang bidang inovasi dan teknologi	Dalam dan luar wilayah Kaltim	Persentase rekomendasi yang dihasilkan litbang bidang inovasi dan teknologi	90%	1.400.000.000	
8	Program litbang bidang sosial dan pemerintahan	Dalam dan luar wilayah Kaltim	Persentase rekomendasi yang dihasilkan litbang bidang sosial dan pemerintahan	90%	1.198.834.000	Program litbang bidang sosial dan pemerintahan	Dalam dan luar wilayah Kaltim	Persentase rekomendasi yang dihasilkan litbang bidang sosial dan pemerintahan	90%	1.198.834.000	
	Jumlah				7.755.334.000					7.755.334.000	

2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Program dan kegiatan kelitbangan sejatinya diperuntukkan untuk kepentingan masyarakat, sehingga perlu dilakukan penelitian aplikatif. Namun penelitian aplikatif untuk tahun 2021 belum dapat dilaksanakan karena efisiensi anggaran, sehingga pengajuan usulan program dan kegiatan kelitbangan pada Balitbangda Prov. Kaltim hanya bersifat fasilitasi kelitbangan, namun tetap mengacu pada isu-isu strategis pembangunan daerah.

BAB III

TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN 2021

3.1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional dan Daerah Tahun 2021

Gubernur Kalimantan Timur mengusung visi “**Berani untuk Kalimantan Timur Berdaulat**”. Adapun pelaksanaannya harus memerhatikan kesinambungan Visi RPJMD Kabupaten/Kota Se-Provinsi Kalimantan Timur agar sejalan dengan rumusan dan tahapan pelaksanaan rencana pembangunan selama periode lima tahun kepemimpinan.

Untuk mewujudkan visi maka diperlukan serangkaian misi. Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi. Dengan melihat fokus dan peta permasalahan dan isu strategis serta amanat misi dalam RPJPD dan RPJMN maka arahan misi pembangunan 2019-2023 adalah:

1. Berdaulat Dalam Pembangunan SDA Yang Berahlak Mulia dan Berdaya Saing, Terutama Perempuan, Pemuda dan Penyandang Disabilitas;
2. Berdaulat dalam pemberdayaan ekonomi wilayah dan ekonomi kerakyatan yang berkedaulatan;
3. Berdaulat dalam memenuhi kebutuhan infrastruktur kewilayahan;
4. Berdaulat dalam pengelolaan SDA yang berkedaulatan;
5. Berdaulat dalam mewujudkan birokrasi pemerintahan yang bersih, profesional dan berorientasi pelayanan publik.

Kebijakan perekonomian daerah sebagai salah satu faktor pendukung keberhasilan pelaksanaan pembangunan daerah perlu didukung dengan pola penggunaan anggaran pembangunan. Dengan kata lain diperlukan optimalisasi penggunaan anggaran dalam mencapai tujuan pembangunan daerah. Hasil evaluasi pelaksanaan pembangunan tahun-tahun sebelumnya dapat dijadikan dasar penentuan penyusunan kebijakan perekonomian dan keuangan daerah. Oleh karena itu, perlu adanya review kembali terhadap program dan kegiatan pembangunan daerah apakah masih layak untuk dilaksanakan, apakah perlu penambahan program dan kegiatan, ataukah perlu juga penghapusan untuk mengoptimalkan pembangunan daerah.

Untuk mencapai sasaran RPJPD Provinsi Kalimantan Timur tahun 2005-2025, maka dalam dokumen perencanaan harus disusun arah kebijakan pembangunan daerah Provinsi Kalimantan Timur.



Sebagaimana tampak pada gambar tersebut, arah kebijakan Provinsi Kalimantan Timur pada RPJMD periode keempat (2019-2023), meliputi :

1. Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat
2. Peningkatan Kualitas SDM
3. Pemantapan Struktur Ekonomi
4. Peningkatan Pelayanan Dasar
5. Efisiensi dan efektivitas, pemerintahan yang berbasis penegakan hukum
6. Konsistensi Penataan Ruang Wilayah Berbasis Ekonomi dan Ekologi
7. Menjaga Kualitas Lingkungan

Visi Balitbangda Provinsi Kalimantan Timur :

Menghasilkan Penelitian untuk Pembangunan dan Kesejahteraan Masyarakat Kalimantan Timur

Misi Balitbangda Provinsi Kalimantan Timur :

1. Menghasilkan Penelitian yang Berkualitas dan Dapat Dipertanggungjawabkan.
2. Meningkatkan Kualitas dan Kuantitas Pembangunan Daerah.
3. Mewujudkan Konektivitas Pembangunan Antar Daerah Kabupaten / Kota.
4. Memberikan Informasi dan Data Akurat Berdasarkan Hasil Penelitian
5. Mengoptimalkan Sumber Daya untuk Peningkatan Kelitbang

3.2 Tujuan dan Sasaran Rencana Kerja (Renja) Balitbangda Prov. Kaltim Tahun 2021

Tujuan Balitbangda Provinsi Kaltim yaitu :

Meningkatkan Kinerja Kebalitbangdaan Dalam Menghasilkan Hasil Penelitian untuk Pembangunan dan Kesejahteraan Masyarakat Kalimantan Timur Serta Mendukung Ibu Kota Negara yang Ramah Lingkungan dan Terintegrasi.

Sasaran Balitbangda Provinsi Kaltim yaitu :

1. Hasil Penelitian yang Mendukung Pembangunan Ibu Kota Negara.
2. Kinerja Balitbangda yang Menghasilkan Penelitian untuk Kesejahteraan Masyarakat.

Tujuan penyusunan Rancangan Akhir Rencana Kerja (Renja) Balitbangda Prov. Kaltim Tahun 2021 adalah memberikan gambaran penyelenggaraan rencana kerja Balitbangda Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2021 serta memberikan gambaran kesesuaian antara program, kegiatan, lokasi kegiatan, indikator kinerja program dan kegiatan serta kelompok sasaran. Sasaran Rancangan Akhir Renja Balitbangda Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2021 adalah sebagai pedoman dalam penyusunan perencanaan pembangunan tahunan daerah Provinsi Kalimantan Timur, yang bersumber dana dari APBD.

3.3. Program dan Kegiatan Tahun 2021

Program dan kegiatan Rancangan Akhir Renja Balitbangda Prov. Kaltim Tahun 2021 disusun dengan berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah dengan memperhatikan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Program dan kegiatan Rancangan Akhir Renja Balitbangda Prov. Kaltim Tahun 2021 disusun dengan anggaran/dana sebagaimana yang tertuang dalam tabel 3.3.1 berikut :

RENCANA KERJA (RENJA) TAHUN 2021

Tabel 3.3.1

Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2021 dan Prakiraan Maju Tahun 2022

Perangkat Daerah: Balitbangda Prov. Kaltim

lembardari

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun .2021				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.000)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp. 000)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
	Urusan Penunjang								
	Bidang Penelitian dan Pengembangan								
	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Tingkat kepuasan pemangku kepentingan terhadap pelayanan PD (SKM)		90%	1.300.000.000	APBD		90%	2.207.595.600
	Pelaksanaan administrasi perkantoran	Jumlah kegiatan pelaksanaan administrasi perkantoran	Samarinda	14	1.300.000.000	APBD	Samarinda	15 Kegiatan	2.207.595.600
	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Unit kerja PD yang memiliki kinerja pelayanan tepat waktu		4 Unit	800.000.000	APBD		5 Unit	1.305.480.000
	Pemeliharaan peralatan dan kelengkapan sarana dan prasarana	Jumlah kegiatan pemeliharaan peralatan dan perlengkapan sarana dan prasarana	Samarinda	17 Kegiatan	800.000.000	APBD		8 Kegiatan	1.305.480.000

RENCANA KERJA (RENJA) TAHUN 2021

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun .2021				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.000)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp. 000)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
	Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pemerintah Daerah	Persentase ASN yang memiliki ASN standar kompetensi		82%	950.550.000	APBD		83%	2.225.752.800
	Koordinasi dan konsultasi kelembagaan pemerintah daerah	Jumlah ASN yang mengikuti rapat koordinasi dan konsultasi	Dalam dan Luar Wilayah Prov. Kaltim	283 Orang	800.000.000	APBD		180 Orang	1.793.092.800
	Peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	Jumlah ASN yang mengikuti kegiatan peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	Dalam dan Luar Wilayah Prov. Kaltim	15 Orang	150.550.000	APBD		13 Orang	432.660.000
	Program Penyusunan Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah	Nilai akuntabilitas kinerja PD		79 (BB)	35.000.000	APBD		80 (A)	72.000.000
	Penyusunan dokumen perencanaan dan anggaran	Jumlah dokumen perencanaan dan anggaran	Samarinda	10 dokumen	20.000.000	APBD		10 dokumen	43.800.000
	Penyusunan Laporan Pengendalian Dan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan	Jumlah laporan evaluasi pengendalian dan evaluasi pelaksanaan	Samarinda	23 laporan	15.000.000	APBD		23 laporan	28.200.000

RENCANA KERJA (RENJA) TAHUN 2021

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun .2021				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.000)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp. 000)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
		kegiatan							
	Program optimalisasi pemanfaatan teknologi	Persentase teknologi yang dapat dimanfaatkan dengan optimal	SMD	80%	720.950.000			80%	1.126.740.000
	Pengembangan teknologi informasi kelitbangan	Persentase terselenggaranya program pemanfaatan teknologi informasi kelitbangan	SMD	80%	220.000.000			80%	298.800.000
		Jumlah artikel jurnal riset pembangunan dan bulletin lembusua	SMD	10 artikel				70 artikel	
	Kegiatan Rakorda Kelitbangan	Persentase terselenggaranya kegiatan Rakorda Kelitbangan	Dalam Wil. Kaltim	100%	500.950.000			100%	827.940.000
	Program Litbang Bidang Sosial dan Pemerintahan	Persentase rekomendasi yang dihasilkan litbang bidang sosial dan pemerintahan	Dalam dan luar wil Kaltim	90%	1.198.834.000	APBD		95%	3.011.310.000
	Litbang Bidang Sosial dan Pemerintah	Jumlah laporan litbang sub bidang kependudukan, pemberdayaan dan	Smd, Bpp, Tgr, PPU, Paser,	3 laporan	800.000.000	APBD		3 laporan	2.004.000.000

RENCANA KERJA (RENJA) TAHUN 2021

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun .2021				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.000)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp. 000)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
		masyarakat desa yang dilaksanakan	Btg, Sangatta, Jakarta						
		Jumlah laporan sub bidang penyelenggaraan pemerintahan dan pengkajian peraturan yang dilaksanakan	Smd, Bpp, Btg, Tgr, Berau, Kubar, PPU, Paser, Sangatta	2 laporan		APBD		1 laporan	
		Jumlah laporan sub bidang sosial dan budaya yang dilaksanakan	Smd, Bpp, Jakarta, Yogyakarta	2 laporan		APBD		1 laporan	
		Kegiatan penelitian mandiri bidang sosial dan pemerintahan	Smd, Bpp, Btg, Tgr, Berau, Kubar, PPU, Paser, Sangatta, Jakarta,		398.834.000	APBD		6 Laporan	1.007.310.000

RENCANA KERJA (RENJA) TAHUN 2021

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun .2021				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.000)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp. 000)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
			Yogyakarta						
	Program Litbang Bidang Ekonomi dan Pembangunan	Persentase rekomendasi yang dihasilkan litbang bidang ekonomi dan pembangunan		90%	1.350.000.000	APBD		95%	2.803.092.000
	Litbang Bidang Ekonomi dan Pembangunan	Jumlah laporan litbang sub bidang ekonomi yang dilaksanakan	PPU, Paser, Kutim, Berau, Bpp, Kukar, Btg, Jabodetabek, Riau, Jatim	1 laporan	1.000.000.000	APBD		3 laporan	2.014.608.000
		Jumlah laporan litbang sub bidang sumber daya alam dan lingkungan hidup yang dilaksanakan	Smd, Bogor	1 laporan		APBD			
		Jumlah laporan sub bidang pengembangan wilayah, fisik dan	PPU, Paser, Bpp, Kukar, Jabodetabe	1 laporan		APBD			

RENCANA KERJA (RENJA) TAHUN 2021

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun .2021				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.000)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp. 000)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
		prasarana yang dilaksanakan	k, Jatim, Bali, NTB, Yogyakarta/ Jawa Tengah						
	Kegiatan penelitian mandiri bidang ekonomi dan pembangunan	Jumlah laporan penelitian mandiri fungsional peneliti bidang ekonomi dan pembangunan yang dilaksanakan	PPU, Paser, Kubar, Kukar, Kutim, Berau, Smd, Bpp, Btg		350.000.000	APBD		5 laporan	788.484.000
	Program Litbang Bidang Inovasi dan Teknologi	Persentase rekomendasi yang dihasilkan litbang bidang inovasi dan teknologi		90%	1.400.000.000	APBD		95%	4.234.576.800
	Litbang Bidang Inovasi dan Teknologi	Jumlah laporan litbang sub bidang inovasi dan pengembangan teknologi yang dilaksanakan	Kukar, Btg, Bpp, kutim, PPU, Paser, Kubar, Mahulu, Berau, Smd, Palembang,	1 laporan	1.200.000.000	APBD		4 laporan	3.730.944.000

RENCANA KERJA (RENJA) TAHUN 2021

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun .2021				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.000)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp. 000)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
			Banyuwangi, Jakarta, banten, Jawa Barat						
		Jumlah laporan litbang sub bidang difusi inovasi dan penerapan teknologi yang dilaksanakan	Smd, Jakarta	1 laporan		APBD			
		Jumlah laporan sub bidang diseminasi kelitbangan yang dilaksanakan	Smd, Luar Prov. Kaltim	1 laporan		APBD			
		Kegiatan penelitian mandiri bidang inovasi dan teknologi	Smd, Kukar, PPU, Luar Prov. Kaltim	1 laporan	200.000.000	APBD		5 laporan	503.632.800

Tabel 3.3.2 Judul Program dan Kegiatan Tahun 2021

No.	Judul Kegiatan
A.	Program Litbang Bidang Sosial dan Pemerintahan
1	Kegiatan Sub Bidang Kependudukan, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
	a. Penilaian Perangkat Daerah Terbaik Di Lingkungan Pemprov. Kaltim Tahun 2020
	b. Kegiatan Quick Research terhadap isu actual
	c. Kajian Optimalisasi Pemberian Beasiswa Kaltim Tuntas Untuk Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Pedesaan
2	Kegiatan Sub Bidang Sosial Budaya
	a. Penghargaan Panji-Panji Keberhasilan Pembangunan Kaltim
	b. Fasilitasi Kegiatan Pokja Litbang Bunda PAUD Provinsi Kaltim
3	Kegiatan Sub Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pengkajian Peraturan
	a. Penelitian Optimalisasi Kinerja Badan Usaha Milik Daerah Provinsi Kalimantan Timur
	b. Penelitian optimalisasi asset Pemprov Kalimantan Timur yang sudah dihapuskan
B.	Program Litbang Bidang Ekonomi Dan Pembangunan
1	Analisis Konektivitas Pembangunan antar kabupaten/kota dalam mendukung IKN
2	Analisis Kontribusi Pemanfaatan SDA terhadap Perolehan Pendapatan Aset Daerah di Prov. Kaltim
C.	Program Litbang Bidang Inovasi Dan Teknologi
1	Kegiatan Sub Bidang Inovasi Teknologi
	a. Penjaringan Peserta Inovasi Kreativitas Pelayanan Perangkat Daerah (Pepes Ikan Peda)
2	Kegiatan Sub Bidang Difusi Inovasi Dan Penerapan Teknologi
	a. Pembentukan Tim fasilitasi Hak Kekayaan Intelektual
	b. Kajian Ekonomi Pendirian The Buluminung Nuclear Industry Science Techno Park (BNISTP)
3	Kegiatan Sub Bidang Diseminasi Kelitbangan
	a. Diseminasi Hasil Penelitian Mandiri Balitbangda Prov. Kaltim
4	Kegiatan Penelitian Mandiri Bidang Inovasi Dan Teknologi
	a. Inovasi Pemanfaatan Lubang Bekas Tambang Batubara sebagai Tempat Pembuangan Akhir Ibu Kota Negara (IKN) Baru.

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Output) Dan Kegiatan (Output)	Data Capaian pada tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program Dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja OPD Penanggung Jawab	Lokasi
						Tahun-1 (2019)		Tahun-2 (2020)		Tahun-3 (2021)		Tahun-4 (2022)		Tahun-5 (2023)		Kondisi Kinerja pada Akhir periode Rsntra PD			
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Rp	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
Terwujudnya birokrasi yang efektif dan efisien	1. Meningkatkan Kualitas Kelitbanan Dalam Mendukung Pemerintahan Daerah	1. Persentase Pemanfaatan Hasil Kelitbanan	Program Litbang Bidang Sosial dan Pemerintahan	Persentase rekomendasi yang dihasilkan litbang bidang sosial dan pemerintahan	0%	70%	435.447.350	80%	370.000.000	90%	1.198.834.000	95%	3.011.310.000	100%	3.613.572.000	100%	9.939.754.350	Bid. Sospek	Dalam dan Luar Prov. Kaltim
	2. Meningkatkan Kemampuan Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Inovasi	2. Persentase PD yang Difasilitasi dalam Penerapan Inovasi Daerah	Kegiatan Litbang Bidang Sosial dan Pemerintahan	Jumlah laporan Litbang Sub Bidang Kependudukan, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Yang Dilaksanakan	0 laporan	1 laporan	295.947.350	1 laporan	61.336.000	3 laporan	800.000.000	3 laporan	2.004.000.000	1 laporan	2.404.800.000	10 laporan	6.624.747.350		

RENCANA KERJA (RENJA) TAHUN 2021

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Output) Dan Kegiatan (Output)	Data Capaain pada tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program Dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja OPD Penanggung Jawab	Lokasi		
						Tahun-1 (2019)		Tahun-2 (2020)		Tahun-3 (2021)		Tahun-4 (2022)		Tahun-5 (2023)		Kondisi Kinerja pad Akhir periode Rsntra PD					
						Target	Rp	Targe t	Rp	Target	Rp	Rp	Rp	Target	Rp	Targe t	Rp				
	(IPTEKIN) secara Konsisten	3. Persentase Kebijakan 3. Persentase Kebijakan Inovasi Daerah yang Diterapkan di Daerah		Jumlah laporan Litbang Sub Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan Yang Dilaksanak an	0 laporan	1 laporan		1 lapora n	148.733.500	1 lapora n	398.834.000	1 lapor an		1 lapora n		5 lapor an					
				Jumlah laporan Litbang Sub Bidang Sosial Dan Budaya Yang Dilaksanak an	0 laporan	1 laporan			1 lapora n	39.930.500		1 lapora n		1 lapor an		1 lapora n			5 lapor an		
				4. Kegiatan penelltia n mandiri bidang social dan pemerin tahan	Jumlah laporan penelitian mandiri fungsional peneliti bidang sosial dan pemerinta han yang dilaksanak an	0 laporan		7 laporan	139.500.000	7 lapora n		120.000.000	6 lapora n		6 lapor an	1.007.310.000		6 lapora n	1.208.772.000	32 lapor an	3.315.007.000

RENCANA KERJA (RENJA) TAHUN 2021

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Out Come) Dan Kegiatan (Output)	Data Capaain pada tahun Awal Perencana naan	Target Kinerja Program Dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja OPD Pena nggu ng Jawa b	Lokasi		
						Tahun-1 (2019)		Tahun-2 (2020)		Tahun-3 (2021)		Tahun-4 (2022)		Tahun-5 (2023)		Kondisi Kinerja pad Akhir periode Rsntra PD					
						Target	Rp	Targe t	Rp	Target	Rp	Rp	Rp	Target	Rp	Targe t	Rp				
			Program Bidang Ekonomi dan Pembangun an	Persentase rekomend asi yang dihasilkan litbang bidang ekonomi dan pembangu nan	0%	70%	477.058.000	80%	345.000.000	90%	1.350.000.000	95%	2.803.092.000	100%	3.363.710.400	100%	9.324.770.400	Bid. Ekban g	Dalam dan Luar Prov.K altim		
			Kegiatan Bidang Ekonomi dan Pembang unan	Jumlah Laporan Litbang Sub Bidang Ekonomi yang dilaksanak an	0 laporan	1 laporan	331.515.000	1 lapora n	84.000.000	1 lapora n	1.000.000.000	1 lapor an	2.014.608.000	1 lapora n	2.417.529.600	5 lapor an	6.692.492.600				
		Jumlah Laporan Litbang Sub Bidang Sumber Daya Alam dan Lingkunga n Hidup yang dilaksanak an		0 laporan	1 laporan	1 lapora n		83.000.000	1 lapora n	1 lapor an		1 lapora n		5 lapor an							
		Jumlah laporan Litbang Sub Bidang pengemba gan Wilayah, Fisik dan		0 laporan	1 laporan	1 lapora n		83.000.000	1 lapora n	1 lapor an		1 lapora n		5 lapor an							

RENCANA KERJA (RENJA) TAHUN 2021

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Out Come) Dan Kegiatan (Output)	Data Capaain pada tahun Awal Perenca naan	Target Kinerja Program Dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja OPD Pena nggu ng Jawa b	Lokasi		
						Tahun-1 (2019)		Tahun-2 (2020)		Tahun-3 (2021)		Tahun-4 (2022)		Tahun-5 (2023)		Kondisi Kinerja pad Akhir periode Rsntra PD					
						Target	Rp	Targe t	Rp	Target	Rp	Rp	Rp	Target	Rp	Targe t	Rp				
				Prasarana yang dilaksanak an																	
			Kegiatan penelitia n mandiri bidang ekonomi dan pemban gunan	Jumlah laporan penelitian mandiri fungsional peneliti bidang ekonomi dan pembang unan yang dilaksanak an	0 laporan	5 laporan	145.543.000	6 lapora n	95.000.000	5 lapora n	350.000.000	6 lapor an	788.484.000	6 lapora n	946.180.800	28 lapor an	2.632.277.800				
			Program Litbang Bidang Inovasi dan Teknolo gi	Persentase rekomend asi yang dihasilkan litbang bidang inovasi dan teknologi	0%	70%	593.920.000	80%	326.000.000	90%	1.400.000.000	95%	4.234.576.800	100%	5.081.492.160	100%	13.764.802.960	Bid. Intek	Dalam dan Luar Prov.K altim		
			Kegiatan litbang Bidang Inovasi dan Teknolog i	Jumlah laporan litbang sub bidang Inovasi dan pengemba ngan teknologi	0 laporan	1 laporan	483.920.000	1 lapora n	125.000.000	2 lapora n	1.200.000.000	2 lapor an	3.730.944.000	2 lapora n	4.477.132.800	8 lapor an	12.051.116.800				

RENCANA KERJA (RENJA) TAHUN 2021

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Out Come) Dan Kegiatan (Output)	Data Capaain pada tahun Awal Perenca naan	Target Kinerja Program Dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja OPD Pena nggu ng Jawa b	Lokasi		
						Tahun-1 (2019)		Tahun-2 (2020)		Tahun-3 (2021)		Tahun-4 (2022)		Tahun-5 (2023)		Kondisi Kinerja pad Akhir periode Rsntra PD					
						Target	Rp	Targe t	Rp	Target	Rp	Rp	Rp	Target	Rp	Targe t	Rp				
				yang dilaksanakan																	
				Jumlah laporan litbang sub bidang difusi inovasi dan penerapan teknologi yang dilaksanak an	0 laporan	1 laporan		1 lapora n	125,000.000	1 lapora n		1 lapor an		1 lapora n		5 lapor an					
				Jumlah laporan litbang sub bidang diseminasi kelitbanga n yang dilaksanak an	0 laporan	1 laporan				1 lapora n		1 lapor an		1 lapora n		4 lapor an					
			Kegiatan penelitia n mandiri bidang inovasi dan teknologi	Jumlah laporan penelitian mandiri fungsional peneliti bidang inovasi dan teknologi yang dilaksanak	0 laporan	4 laporan	110.000.000	1 lapora n	76.000.000	1 lapora n	200.000.000	4 lapor an	503.632.800	4 lapora n	604.359.360	14 lapor an	1.713.686.160				

RENCANA KERJA (RENJA) TAHUN 2021

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Output) Dan Kegiatan (Output)	Data Capaian pada tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program Dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja OPD Penanggung Jawab	Lokasi		
						Tahun-1 (2019)		Tahun-2 (2020)		Tahun-3 (2021)		Tahun-4 (2022)		Tahun-5 (2023)		Kondisi Kinerja pada Akhir periode Rsntra PD					
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Rp	Rp	Target	Rp	Target	Rp				
				an																	
Memfasilitasi kegiatan kelitban gan pemerintahan dan pembangunan serta inoovasi daerah.	Terlaksannannya kegiatan peningkatan kapasitas kelitbang an di Provinsi Kalimantan Timur	Meningkatnya nilai akuntabilitas kinerja PD	Program Penyusunan Dokumen Perencanaan Pengendalian dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan	Nilai akuntabilitas kinerja PD		78 (BB)	174.620.000	79 (BB)	52.500.000	79 (BB)	35.000.000	80 (A)	72.000.000	81 (A)	86.400.000	81 (A)	445.520.000	Sekretariat	Prov. Kaltim		
			Kegiatan Penyusunan Dokumen perencanaan dan Anggaran	Jumlah dokumen perencanaan dan anggaran	0 dokumen	10 dokumen	103.120.000	10 dokumen	31.000.000	10 dokumen	20.000.000	10 dokumen	43.800.000	10 dokumen	52.560.000	50 dokumen	266.980.000				
			Kegiatan Penyusunan Laporan Pengendalian dan Evaluasi Penyelenggaraan	Jumlah laporan evaluasi pengendalian dan evaluasi pelaksanaan kegiatan	0 laporan	23 laporan	71.500.000	23 laporan	21.500.000	23 laporan	15.000.000	23 laporan	28.200.000	23 laporan	33.840.000	115 laporan	178.540.000				

RENCANA KERJA (RENJA) TAHUN 2021

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Out Come) Dan Kegiatan (Output)	Data Capaain pada tahun Awal Perencana naan	Target Kinerja Program Dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja OPD Pena nggu ng Jawa b	Lokasi		
						Tahun-1 (2019)		Tahun-2 (2020)		Tahun-3 (2021)		Tahun-4 (2022)		Tahun-5 (2023)		Kondisi Kinerja pad Akhir periode Rsntra PD					
						Target	Rp	Targe t	Rp	Target	Rp	Rp	Rp	Target	Rp	Targe t	Rp				
			Pemerint ah																		
		Persenta se meningk atnya pelayana n PD	Program Pelayana n Administ rasi Perkanto ran	Tingkat kepuasan pemangku kepentingan terhadap pelayanan PD (SKM)	0%	80%	1.349.575.000	85%	1.393.409.360	90%	1.300.000.000	95%	2.207.595.600	100%	2.649.114.720	100%	9.439.357.680	Sekre tariat	Samari nda		
			kegiatan pelaksan aan administr asi perkanto ran	Jumlah kegiatan pelaksana an administra si perkantora n	0 kegiatan	15 Kegiata n	1.349.575.000	15 Kegiat an	1.393.409.360	15 Kegiat an	1.300.000.000	15 Kegiat an	2.207.595.600	15 Kegiat an	2.649.114.720	75 Kegiat an	9.439.357.680				
		Persenta se meningk atnya pelayana n unit kerja PD	Program Peningka tan Sarana dan Prasaran a Aparatur	Unit kerja PD yang memiliki kinerja pelayanan tepat waktu	0 unit	2 Unit	511.450.000	3 Unit	544.650.000	4 Unit	800.000.000	5 Unit	1.305.480.000	5 Unit	1.566.576.000	5 Unit	5.016.056.000	Sekre tariat	Samari nda		
			Kegiatan Pemeliha raan Peralatan Dan Perlengk apanm Sarana Dan Prasaran	Jumlah kegiatan pemelihar aan peralatan dan perlengka pan sarana dan prasarana	0 kegiatan	8 Kegiata n	511.450.000	8 Kegiat an	544.650.000	8 Kegiat an	800.000.000	8 Kegiat an	1.305.480.000	8 Kegiat an	1.566.576.000	40 Kegiat an	5.016.056.000				

RENCANA KERJA (RENJA) TAHUN 2021

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Output) Dan Kegiatan (Output)	Data Capaian pada tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program Dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja OPD Penanggung Jawab	Lokasi
						Tahun-1 (2019)		Tahun-2 (2020)		Tahun-3 (2021)		Tahun-4 (2022)		Tahun-5 (2023)		Kondisi Kinerja pada Akhir periode Rsntra PD			
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Rp	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
			a																
		Persentase meningkatnya kapasitas kelembagaan Balitbangda, SDM dan fasilitas pendukung.	Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pemerintahan Daerah	Persentase ASN yang memiliki ASN standar kompetensi	0 %	80%	1.073.935.000	81 %	877.480.000	82%	950.550.000	83%	2.225.752.800	85%	2.670.903.360	85%	8.702.865.160	Sekretariat	Prov. Kaltim
			Kegiatan Koordinasi Dan Konsultasi Kelembagaan Pemerintah Daerah	Jumlah ASN yang mengikuti rapat koordinasi dan konsultasi	0 orang	77 Orang	986.485.000	130 Orang	807.180.000	155 Orang	800.000.000	180 orang	1.793.092.800	205 Orang	2.151.711.360	747 orang	7.232.713.160		

RENCANA KERJA (RENJA) TAHUN 2021

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Output) Dan Kegiatan (Output)	Data Capaian pada tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program Dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja OPD Penanggung Jawab	Lokasi		
						Tahun-1 (2019)		Tahun-2 (2020)		Tahun-3 (2021)		Tahun-4 (2022)		Tahun-5 (2023)		Kondisi Kinerja pada Akhir periode Rsntra PD					
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Rp	Rp	Target	Rp	Target	Rp				
			Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Jumlah ASN yang mengikuti kegiatan peningkatan kualitas Sumber Daya Aparatur	0 Orang	10 Orang	87.450.000	11 Orang	70.300.000	12 Orang	150.550.000	13 Orang	432.660.000	13 Orang	519.192.000	60 Orang	1.470.152.000				
Menyediakan dan menyebarkan hasil kelitban gan dan inovasi daerah	Tersedian ya hasil kelitbang an dan inovasi daerah kepada stakehol ders	Tersedian ya database kelitbang an dan inovasi daerah berbasis web yang berkualitas	Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi	Persentase teknologi yang dapat dimanfaatkan dengan optimal	0%	80%	129.420.000	80%	326.070.000	80%	720.950.000	80%	1.126.740.000	80%	1.352.088.000	80%	3.873.268.000	Sekretariat	Samarinda		
	Tersebar luaskannya hasil kelitbang an dan inovasi daerah kepada stakeholder	Meningkatnya penyebarluasan hasil kelitbang an (press release, sosialisasi, diseminasi dan peragaan)																			

RENCANA KERJA (RENJA) TAHUN 2021

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Out Come) Dan Kegiatan (Output)	Data Capaain pada tahun Awal Perenca naan	Target Kinerja Program Dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja OPD Pena nggu ng Jawa b	Lokasi		
						Tahun-1 (2019)		Tahun-2 (2020)		Tahun-3 (2021)		Tahun-4 (2022)		Tahun-5 (2023)		Kondisi Kinerja pad Akhir periode Rsntra PD					
						Target	Rp	Targe t	Rp	Target	Rp	Rp	Rp	Target	Rp	Targe t	Rp				
			Kegiatan pengemb angan teknologi informasi kelitbang an	Persentase terselengg aranya program pemanfaat an teknologi informasi kelitbanga n	0%	80%	42.550.000	80%	106.550.000	80%	220.000.000	80%	298.800.000	80%	358.560.000	80%	1.055.460.000				
				Jumlah artikel jurnal riset pembangu nan dan bulletin lembusuan a	0 artikel	70 artikel		70 artikel		70 artikel		70 artike l		70 artikel		350 artike l					
			Kegiatan Rakorda Kelitbang an	Persentase terselengg aranya kegiatan Rakorda Kelitbanga n	0%	100%	86.870.000	100%	219.520.000	100%	500.950.000	100%	827.940.000	100%	993.528.000	100%	2.817.808.000				
TOTAL ANGGARAN							4.745.425.350.		4.235.109.360		7.755.334.000		16.986.547.200		20.383.856.640		60.506.394.550				

BAB V

P E N U T U P

Bahwa Rencana Kerja (Renja) Balitbangda Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2021 merupakan rencana pelaksanaan program dan kegiatan kelitbangan yang akan dilaksanakan pada tahun 2021.

Bahwa Renja Balitbangda Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2021 dibuat dengan mempedomani Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017, Renstra Balitbangda Prov. Kaltim Tahun 2019-2023, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2019-2023, Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 12 Tahun 2020 Tentang Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Balitbangda Prov. Kaltim serta Peraturan Gubernur Nomor 42 tahun 2020 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2021.

Bahwa melalui Renja Balitbangda Prov. Kaltim Tahun 2021 ini, diharapkan dapat menjadi pedoman dalam pencapaian target kinerja program dan kegiatan, serta untuk terwujudkannya sinergitas semua pihak yang terkait dengan kelitbangan.

AGENDA RENCANA KERJA BALITBANGDA PROV. KALTIM TAHUN 2021

[illegible]

No	Kode				Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)	Penanggung Jawab	Pelaksanaan														
1	2				3	4	5	6														
				01	Litbang Bidang Sosial dan Pemerintahan	Jumlah laporan Litbang Sub Bidang Kependudukan, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Yang Dilaksanakan																
						Jumlah laporan Litbang Sub Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan Yang Dilaksanakan																
						Jumlah laporan Litbang Sub Bidang Sosial Dan Budaya Yang Dilaksanakan																
7	07	01	41		Program Litbang Bidang Ekonomi dan Pembangunan	Persentase rekomendasi yang dihasilkan litbang bidang ekonomi dan pembangunan	Bidang Ekonomi dan Pembangunan															
				01	Litbang Bidang Ekonomi dan Pembangunan	Jumlah Laporan Litbang Sub Bidang Ekonomi yang dilaksanakan																
						Jumlah Laporan Litbang Sub Bidang Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup yang dilaksanakan																
						Jumlah laporan Litbang Sub Bidang pengembangan Wilayah, Fisik dan Prasarana yang dilaksanakan																
8	07	01	47		Program Litbang Bidang Inovasi & Teknologi	Persentase rekomendasi yang dihasilkan litbang bidang inovasi dan teknologi	Bidang Inovasi dan Teknologi															
				01	Litbang Bidang Inovasi dan Teknologi	Jumlah laporan litbang sub bidang Inovasi dan pengembangan teknologi yang dilaksanakan																
						Jumlah laporan litbang sub bidang difusi inovasi dan penerapan teknologi yang dilaksanakan																
						Jumlah laporan litbang sub bidang diseminasi keliitbangan yang dilaksanakan																
				02	Penelitian Mandiri Bidang Inovasi dan Teknologi	Jumlah laporan penelitian mandiri bidang inovasi dan teknologi																

No	Kode	Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)	Penanggung Jawab	Pelaksanaan
1	2	3	4	5	6

No.	Nama	Jabatan	Paraf
1.	Drs.H. Mohammad Rozaly, M.Si	Sekretaris	
2.	Rabiatul Adawiyah, S.E	Kasubbag. Perencanaan & Keuangan	



PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH

Jalan M.T. Haryono, Telp. (0541) 201446 Fax. (0541) 732286

web [http : //litbang.kaltimprov.go.id](http://litbang.kaltimprov.go.id)

e-mail : humas.litbang@litbang.kaltimprov.go.id

SAMARINDA (75124)

KEPUTUSAN

KEPALA BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

NOMOR : 050/44/ I.2 / Litbang

TENTANG

PENYUSUNAN RENCANA KERJA
(RENJA) BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR TAHUN 2021

KEPALA BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

- Menimbang** :
- a. bahwa Rencana Kerja (Renja) Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2021 memberikan gambaran tentang program dan kegiatan yang akan dikerjakan dalam satu tahun anggaran yaitu tahun 2021;
 - b. bahwa sesuai Pasal 19 Undang-undang Nomor : 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, dimana Renja Perangkat Daerah ditetapkan dengan peraturan pimpinan Perangkat Daerah setelah disesuaikan dengan RKPD, serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah apabila RKPD telah disusun maka segera ditindaklanjuti dengan menyusun Rancangan Awal Renja, Rancangan Renja, Rancangan Akhir Renja dan Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah;
 - c. bahwa dengan terbitnya Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah dan Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor : 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 81 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Balitbangda Prov. Kaltim, Struktur Organisasi Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2020 sampai dengan tahun berjalan telah disesuaikan dengan peraturan tersebut;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a,b dan c perlu menetapkan Surat Keputusan Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Kalimantan Timur tentang Penyusunan Rencana Kerja (Renja) Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2021.

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2002 tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan, dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Pengelolaan Keuangan Negara;
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah;
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang No. 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2017 tentang Inovasi Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Pedoman Penelitian dan Pengembangan di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
13. Instruksi Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 060/2700/Litbang, tanggal 1 September 2016 perihal Pedoman Arah Penataan Kelembagaan Litbang Di Lingkungan Pemda Sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
14. Peraturan Bersama Menteri Negara Riset dan Teknologi Nomor 03 Tahun 2012 dan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2012 tentang Penguatan Sistem Inovasi Daerah;
15. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 15 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Kaltim Tahun 2005 - 2025;
16. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 2 Tahun 2019, tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2019-2023;
17. Peraturan Daerah Kalimantan Timur Nomor 9 Tahun 2016, tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat daerah Provinsi Kalimantan Timur);


- Memperhatikan :**
1. Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 7 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Penelitian dan Pengembangan Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Timur ;
 2. Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 81 Tahun 2016 Tentang Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Balitbangda Prov. Kaltim;
 3. Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 24 Tahun 2019 Tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2019-2023.
 4. RPJMD Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2019-2023.
 5. Rencana Strategis (RENSTRA) Balitbangda Prov. Kaltim Tahun 2019-2023;
 6. Surat Perintah Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Prov. Kaltim, Nomor : 821.2/III.2-012/TUUA/BKD/2020.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- PERTAMA :** Penetapan Penyusunan Rencana Kerja (Renja) Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2021 disesuaikan dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah; dan Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 81 Tahun 2016;
- KEDUA :** Penetapan Penyusunan Rencana Kerja (Renja) Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2021 sebagaimana Diktum Pertama merupakan landasan bagi unit kerja di lingkungan Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Kalimantan Timur dalam melaksanakan program dan kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi perangkat daerah yang telah ditetapkan;
- KETIGA :** Penetapan Tim Penyusun Rencana Kerja (Renja) Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2021 ditetapkan sesuai dengan lampiran berikut;
- KEEMPAT :** Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan, maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Samarinda
Pada tanggal : 24 Agustus 2020


Kepala,
Abdullah Sami, SH, M. Hum
Pembina Utama Madya
NIP. 19640101 199003 1028

Tembusan :
Kepada Yth.

1. Gubernur Kalimantan Timur di Samarinda.
2. Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Timur di Samarinda.
3. Kepala Bappeda Provinsi Kalimantan Timur di Samarinda.
4. Inspektur Inspektorat Wilayah Provinsi Kalimantan Timur.
5. Yang bersangkutan.



GOVERNOR OF EAST KALIMANTAN

SALINAN SALINANKEPUTUSAN GOVERNOR OF EAST KALIMANTAN

NOMOR 050/K.435/2020

TENTANG

PENETAPAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH PROVINSI
KALIMANTAN TIMUR TAHUN 2021

GOVERNOR OF EAST KALIMANTAN,

- Menimbang : a. bahwa sesuai ketentuan Pasal 142 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta tata cara perubahan rencana pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, bahwa rancangan akhir Rencana Kerja Perangkat Daerah Provinsi yang telah diverifikasi oleh Kepala Bappeda Provinsi Kalimantan Timur disampaikan kepada Kepala Daerah melalui Sekretaris Daerah untuk ditetapkan dengan keputusan kepala daerah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dipandang perlu menetapkan Keputusan Gubernur Kalimantan Timur tentang Penetapan Rencana Kerja Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Timur;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Otonom Provinsi Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan dan Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1106);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5979);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 40 Tahun 2020 tentang Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2021 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 590);
8. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 15 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2008 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 39);
9. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 2 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2019-2023 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2019 Nomor 2);
10. Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 42 Tahun 2020 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2021 (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2020 Nomor 43);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Rencana Kerja Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2021, dengan daftar perangkat daerah dan rencana kerja sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.
- KEDUA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Kalimantan Timur melalui Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Kalimantan Timur.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Samarinda
pada tanggal 27 Agustus 2020

GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR ,

ttd

ISRAN NOOR

Tembusan :

1. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia di Jakarta;
2. Inspektur Daerah Provinsi Kalimantan Timur di Samarinda;
3. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Kalimantan Timur di Samarinda;
4. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Kalimantan Timur di Samarinda;
5. Yang bersangkutan.



LAMPIRAN : KEPUTUSAN GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR NOMOR 050/K.435/2020 TENTANG PENETAPAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR TAHUN 2021

DAFTAR PERANGKAT DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR YANG TELAH DILAKUKAN VERIFIKASI RENCANA KERJA TAHUN 2021 DAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH

DAFTAR PERANGKAT DAERAH YANG TELAH DIVERIFIKASI RENCANA KERJA TAHUN 2021

1. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Timur
2. Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Timur
3. Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat Provinsi Kalimantan Timur
4. Satuan POLisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Timur
5. Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Timur
6. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Kalimantan Timur
7. Dinas Kependudukan, Pemberdayaan perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Kalimantan Timur
8. Dinas Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Kalimantan Timur
9. Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Timur
10. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Provinsi Kalimantan Timur
11. Dinas Perhubungan Provinsi Kalimantan Timur
12. Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kalimantan Timur
13. Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Provinsi Kalimantan Timur

14. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kalimantan Timur
15. Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Kalimantan Timur
16. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Kalimantan Timur
17. Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Timur
18. Dinas Pariwisata Provinsi Kalimantan Timur
19. Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Timur
20. Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Kalimantan Timur
21. Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur
22. Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kalimantan Timur
23. Badan Penghubung Provinsi Kalimantan Timur
24. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kalimantan Timur
25. Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Kalimantan Timur
26. Inspektorat Daerah Provinsi Kalimantan Timur
27. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Kalimantan Timur
28. Badan Pendapatan Daerah Provinsi Kalimantan Timur
29. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Kalimantan Timur
30. Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Kalimantan Timur
31. Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Kalimantan Timur
32. Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Kalimantan Timur
33. Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Timur
34. Sekretariat DPRD Provinsi Kalimantan Timur
35. Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI Provinsi Kalimantan Timur
36. RSUD A. Wahab Syahrani Provinsi Kalimantan Timur
37. RSUD Kanujodo Djatiwibowo Provinsi Kalimantan Timur
38. Rumah Sakit Jiwa Daerah Atma Husada Mahakam Provinsi Kalimantan Timur